



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA  
PAYAKUMBUH NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA DINAS  
TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN  
TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN  
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2024.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

## Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

## Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD yang bersifat indikatif.

## Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
  - a. bab I memuat pendahuluan;

- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. dinas pendidikan;
  - b. dinas kesehatan;
  - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
  - f. badan penanggulangan bencana Daerah;
  - g. dinas sosial;
  - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
  - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - j. dinas ketahanan pangan;
  - k. dinas lingkungan hidup;
  - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. dinas perhubungan;
  - n. dinas komunikasi dan informatika;
  - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
  - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
  - s. dinas pertanian;
  - t. sekretariat Daerah;
  - u. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - v. Bappeda;
  - w. badan keuangan Daerah;
  - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - y. inspektorat;
  - z. kecamatan payakumbuh utara;
  - aa. kecamatan payakumbuh barat;
  - bb. kecamatan payakumbuh timur;
  - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
  - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
  - ee. kantor kesbangpol
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan perubahan.  
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 7

## KATA PENGANTAR

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas;
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya.

Tujuan 2 dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 Kota Payakumbuh menjadi bagian dari tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mewujudkannya.

Langkah awal dari upaya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai urusan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian sudah dapat dirumuskan dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya. Renja Tahun 2024 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan strategis pembangunan ekonomi masyarakat melalui ketenagakerjaan dan perberdayaan IKM.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini sudah dapat di rampungkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Petunjuk Pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan bagian dari Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan.

Dan ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim perumus dan penyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian Tujuan, Sasaran dan Program Pelaksanaan Pembangunan untuk masa lima tahun kedepan. Terima Kasih.

Payakumbuh, Agustus 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Payakumbuh



**YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	6
1.4    Sistematika Penulisan .....	7
BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	8
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	45
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	56
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	62
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	74
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	89
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	89
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	94
3.3    Program dan Kegiatan .....	94
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	108
BAB V     PENUTUP .....	120
LAMPIRAN .....	123

**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Evaluasi Hasil Pelaksana Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Desember 2022 Kota Payakumbuh .....	26
Tabel II.2	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	55
Tabel II.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Payakumbuh .....	64
Tabel II.4a.1	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Tahun 2023 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Per Kecamatan .....	76
Tabel II.4a.2	Persandingan Daftar Kegiatan Dan E - Pokir Tahun 2023 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Per Kecamatan .....	84
Tabel II.4b	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 .....	87
Tabel III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2025 Kota Payakumbuh .....	96
Tabel IV.1	Pemerintah Kota Payakumbuh Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	109
Tabel IV. 2	Usulan Program/Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2024 .....	117

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh disusun sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas, sehingga target kinerja yang telah direncanakan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat tercapai dengan baik. Rencana Kerja juga diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu untuk ditindak lanjuti sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja untuk mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan analisis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan mencantumkan program dan kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek

sebagai penerjemahan dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa proses persiapan dan tahapan, diantaranya sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
3. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024. Proses penyusunan Renja sesuai dengan bahan Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang akan mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023-2026, sehingga akan memudahkan di dalam mengukur target kinerja tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah

- Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 54);
30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
  31. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
  32. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
  33. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 21);
  34. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kota Payakumbuh di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan;
2. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk 1 (satu) tahun mendatang.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2024;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian serta laporan kinerja;

3. Terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

##### 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

###### 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini dilaksanakan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Persentase industri yang menerapkan Teknologi Tepat Guna sebesar 3,35% dan terealisasi sebesar 0,52 % dengan capaian 15,52%. Tidak tercapainya target dikarenakan peningkatan dan pengembangan penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah belum dapat dilakukan secara maksimal, disebabkan belum disediakannya anggaran yang cukup untuk melakukan pelatihan TTG bagi pelaku usaha. Untuk Tahun 2022 pembinaan melalui pelatihan pembuatan teknologi tepat guna baru bisa dilakukan terhadap 10 IKM.

Untuk kegiatan dan sub kegiatan di Program Perencanaan dan Pembangunan Industri realisasi target kinerja tercapai.

##### 2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program ini dilaksanakan dengan target Nilai IKM sebesar 90 dan terealisasi sebesar 91,27 dengan capaian 101,41% yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan ini berupa Penyusunan dokumen SOP, Renja, Perubahan Renja dan IKM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan capaian 100 %. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.065.330,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.617.230,- atau 99,05%.
    - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen laporan (LAKIP, LKPJ, EKPPD dan Laporan bulanan) serta pelaksanaan rapat koordinasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 4 dokumen dan 7 kali dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dan 7 kali dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.838.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.653.260,- atau 99,65%.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Sub kegiatan ini berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, penyediaan pembayaran honor pengelola administrasi keuangan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan serta pembayaran uang lembur dan uang makan lembur pada Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 39 orang dan terealisasi sebanyak 39 orang dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.372.480.665,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.243.928.282,- atau 94,58%.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Sub kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta atribut lengkap dengan target sebanyak 19 stel dan terealisasi sebanyak 19 stel dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.095.080,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.880.000,- atau 97,87%.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Sub kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 7 jenis dan terealisasi sebanyak 7 jenis dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.003.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.003.300,- atau 100%.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Sub kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 86 jenis dan terealisasi sebanyak 86 jenis dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.848.960,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.704.060,- atau 99,70%.
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Sub kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetak, biaya penggandaan dan penjilidan pada Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 9 jenis dan terealisasi sebanyak 9 jenis dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.863.230,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.821.330,- atau 99,85%.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar yaitu Padang Ekspres dan Haluan pada sebanyak 1.016 eksemplar dan terealisasi sebanyak 1.016 eksemplar dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.004.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.004.560,- atau 100%.

e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman tamu pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 780 porsi dan terealisasi sebanyak 780 porsi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.387.900,- atau 99,17%.

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 50 kali dan terealisasi 50 kali dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 303.703.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 303.618.979,- atau 99,97%.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini berupa penyediaan benda pos berupa materai dengan target sebanyak 57 lembar dan terealisasi

- sebanyak 57 lembar dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 570.000,- atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Sub kegiatan ini berupa penyediaan jasa komunikasi dan listrik pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 2 rekening dan terealisasi sebanyak 2 rekening dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.179.664,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.876.918,- atau 83,84%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Sub kegiatan ini Kantor berupa penyediaan Honor TJP kebersihan, TJP keamanan dan TJP Pramubakti dengan target sebanyak 4 orang, terealisasi sebanyak 4 orang dan penyediaan makan minum sebanyak 400 porsi terealisasi sebanyak 400 porsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.277.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.546.768,- atau 99,38%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Sub kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan (penggantian suku cabang, service, oli/pelumas) dan BBM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.072.913,- atau 99,70%.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas, (penggantian suku cabang, service, oli/pelumas) dan BBM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dan terealisasi sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.207.289,- atau 99,68%.

- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan meja kerja dan lemari pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 48 unit dan terealisasi sebanyak 48 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.638.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.593.600,- atau 99,20%.

2). Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 99 orang dengan capaian 198%
2. Jumlah tenaga kerja yang diserap wirausaha sebanyak 75 orang dan terealisasi sebanyak 75 orang dengan capaian 100%

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub kegiatan ini berupa pelatihan menjahit pengembangan busana dan pelatihan membuat kue dan roti dengan target sebanyak 48 orang dan terealisasi sebanyak 48 orang

dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.583.010,- dan terealisasi sebesar Rp. 193.582.881,- atau 91,93%.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan target jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 261 orang dan terealisasi sebanyak 297 orang dengan capaian 113,79% yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dengan target sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.411.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.308.550,- atau 96,60%.

b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini berupa pembayaran honor Tenaga Jasa Perorangan dengan target sebanyak 3 orang dan terealisasi sebanyak 3 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.138.332,- dan terealisasi sebesar Rp. 84.230.632,- atau 96,66%.

4) Program Hubungan Industrial

Program ini dilaksanakan dengan target jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebanyak 3 kasus dan terealisasi sebanyak 1 kasus (sesuai dengan jumlah kasus yang masuk) dengan capaian 33,33%, yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial perusahaan dengan target sebanyak 50 perusahaan dan terealisasi sebanyak 50 perusahaan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.238.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.153.280,- atau 93,31%.

- b) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa kasus (perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja) yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Bidang Tenaga Kerja) yang difasilitasi untuk penyelesaiannya dengan target sebanyak 1 kasus dan terealisasi sebanyak 1 kasus dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.079.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.811.400,- atau 93,43%.

5) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini dilaksanakan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Persentase sentra/klaster industri yang tertata sebesar 60,00% dan terealisasi sebesar 75% dengan capaian 125%

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sub Kegiatan ini berupa biaya operasional Dekranasda dalam mengikuti agenda rutin Dekranasda Propinsi dan Pusat, pembuatan buku memori Dekranasda, pembuatan

buku sentra tenun dengan target sebanyak 2 buku dan terealisasi sebanyak 2 buku serta mengikuti Event Minangkabau Fashion Heritage, Event Minangkabau Fashion Festival dengan target sebanyak 2 event dan terealisasi sebanyak 2 event dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 367.603.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 333.545.078,- atau 90,74%.

b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan/workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui Teknologi Tepat Guna, dimana kegiatan ini merupakan pembinaan dan fasilitasi untuk IKM seksi industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan khususnya IKM bengkel las Kota Payakumbuh yang telah memiliki sertifikasi profesi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dalam mengembangkan kreatifitas, menciptakan inovasi pembuatan produk-produk TTG yang dapat bernilai guna bagi usaha lain, untuk Tahun 2022 TTG yang dicoba dibuat adalah mesin chopper atau mesin pencacah yang dapat digunakan oleh usaha peternakan dalam pengolahan makanan ternak dengan target peserta sebanyak 10 IKM dan terealisasi sebanyak 10 IKM dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.108.415,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.572.080,- atau 98,22%.

c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran belanja jasa kantor (honor tenaga keamanan, honor tenaga kebersihan, honor tenaga pramubakti, honor tenaga ahli operator mesin sentra rendang, JKK, JKM) Pengadaan Peralatan Operasional Sentra IKM Rendang, pembelian tabung gas,

penyediaan sarana prasarana kegiatan produksi sentra rendang, penyediaan sarana prasarana kegiatan administrasi kantor, kebersihan kantor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat komputer), registrasi/keanggotaan (sertifikasi surveillance HACCP), biaya makan minum rapat, makan minum tamu, biaya perjalanan dinas Tim Sertifikasi dengan target sebanyak 13 orang dan terealisasi sebanyak 13 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 535.312.899,- dan terealisasi sebesar Rp. 521.108.928,- atau 97,35%.

- d) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  
Sub Kegiatan ini berupa pembayaran honorarium TJP di Mall Pelayanan Publik dan TJP Tenun Balai Panjang dengan target sebanyak 4 orang, terealisasi sebanyak 4 orang serta pelaksanaan Workshop sandang dan kerajinan dengan target sebanyak 15 IKM, terealisasi sebanyak 15 IKM dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.838.676,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.827.616,- atau 98,53%.

**3) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

- 1) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
1. Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk sebesar 2,75% dan terealisasi sebesar 8,40% dengan capaian 305,55%.
  2. Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk sebesar 1 buah dan terealisasi sebesar 6 buah dengan capaian 600%

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan

Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini berupa fasilitasi Sertifikat Halal untuk IKM Industri Pangan dengan target sebanyak 6 IKM dan terealisasi sebanyak 6 IKM dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.129.770,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.574.690,- atau 99,09%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua urusan terlaksana dengan baik, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2022 menunjukkan bahwa sasaran yang diinginkan pada Tahun 2022 telah memenuhi target. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian Kegiatan/Program/Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.735.102.141,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.507.201.524,- atau 95,19%.

#### **4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :
- Kurangnya analisis dalam menentukan target kinerja yang direncanakan, sehingga tidak dapat teralisasi;
  - Pagu anggaran yang terbatas, sehingga kegiatan tidak dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain :
- Adanya kerjasama dengan semua pihak dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai kewenangan.

- c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain :
  - Adanya respon dan antusiasme dari pelaku usaha/IKM dan dukungan dari stakeholder dengan semua pihak dalam rangka memfasilitasi pengurusan sertikat halal untuk produk IKM, sehingga pencapaian target kinerja melebihi dari target yang ditetapkan.

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. **Terhadap realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :**
  - 1. Target kinerja Program Hubungan Industrial dengan target program akhir Renstra 12 kasus, terealisasi sebanyak 10 kasus (sesuai dengan jumlah kasus yang masuk) dengan capaian 83,33%, untuk kegiatan dan sub kegiatan realisasi target kinerja tercapai.
- b. **Terhadap realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :**
  - 1. Target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra 80%. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi 95,26% dengan kegiatan :
    - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 80%, realisasi 99,37%, dengan sub kegiatan :
      - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 4 dokumen

- dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan capaian 100 %.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target sebanyak 4 dokumen dan 7 kali dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dan 7 kali dengan capaian 100%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 80%, realisasi 94,58%, dengan sub kegiatan :
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target sebanyak 39 orang dan terealisasi sebanyak 39 orang dengan capaian 100%.
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%, realisasi 100%, dengan sub kegiatan :
    - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan target sebanyak 19 stel dan terealisasi sebanyak 19 stel dengan capaian 100%.
  - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 80%, realisasi 99,91%, dengan sub kegiatan :
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target sebanyak 7 jenis dan terealisasi sebanyak 7 jenis dengan capaian 100%.
    - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target sebanyak 86 jenis dan terealisasi sebanyak 86 jenis dengan capaian 100%.
    - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target sebanyak 9 jenis dan terealisasi sebanyak 9 jenis dengan capaian 100%.
    - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target

- sebanyak 1.016 eksemplar dan terealisasi sebanyak 1.016 eksemplar dengan capaian 100%.
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target sebanyak 780 porsi dan terealisasi sebanyak 780 porsi dengan capaian 100%.
  - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target sebanyak 50 kali dan terealisasi 50 kali dengan capaian 100%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 80%, realisasi 90,86% dengan sub kegiatan yaitu :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target sebanyak 57 lembar dan terealisasi sebanyak 57 lembar dengan capaian 100%.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target sebanyak 2 rekening dan terealisasi sebanyak 2 rekening dengan capaian 100%.
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target sebanyak 4 orang, terealisasi sebanyak 4 orang dan penyediaan makan minum sebanyak 400 porsi terealisasi sebanyak 400 porsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan capaian 100%.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 80%, realisasi 99,66% dengan sub kegiatan yaitu :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit dengan capaian 100%.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

- Operasional atau Lapangan dengan target sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dan terealisasi sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dengan capaian 100%.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan target sebanyak 48 unit dan terealisasi sebanyak 48 unit dengan capaian 100%.
2. Target kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target program akhir Renstra 231 orang, terealisasi sebanyak 259 orang dengan capaian 112,12%, dengan kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan target sebanyak 50 orang, realisasi sebanyak 73 orang dengan sub kegiatan :
- a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan target sebanyak 48 orang dan terealisasi sebanyak 48 orang dengan capaian 100%.
3. Target kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target program akhir Renstra sebesar 60% terealisasi sebesar 75% dengan capaian 125%, dengan kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebanyak 10 dokumen terealisasi sebanyak 10 dokumen dengan capaian 100%, dengan sub kegiatan :
- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan target sebanyak 2 buku dan terealisasi sebanyak 2 buku serta mengikuti Event Minangkabau Fashion Heritage, Event Minangkabau Fashion Festival dengan target sebanyak 2 event dan terealisasi sebanyak 2 event dengan capaian 100%.

- b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan target peserta sebanyak 10 IKM dan terealisasi sebanyak 10 IKM dengan capaian 100%.
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan target sebanyak 13 orang dan terealisasi sebanyak 13 orang dengan capaian 100%.
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan target sebanyak 4 orang, terealisasi sebanyak 4 orang serta pelaksanaan Workshop sandang dan kerajinan dengan target sebanyak 15 IKM, terealisasi sebanyak 15 IKM dengan capaian 100%.
- c. Terhadap realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :**
- 1. Target kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target program akhir Renstra 261 orang, terealisasi sebanyak 297 orang dengan capaian 113,79%, dengan kegiatan yaitu :
    - 1) Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan target 40 orang, realisasi 40 orang dengan sub kegiatan :
      - a) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan target sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang dengan capaian 100%.
    - 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan target 40 orang, realisasi 40 orang dengan sub kegiatan :
      - a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan target sebanyak 3 orang dan terealisasi sebanyak 3 orang dengan capaian 100%.

2. Target kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan target akhir Renstra sebesar 2,75%, terealisasi sebesar 8,40% dengan capaian 305,45%, dengan kegiatan :
  - 1) Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 20 IKM, realisasi 15 IKM dengan sub kegiatan :
    - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target sebanyak 6 IKM dan terealisasi sebanyak 6 IKM dengan capaian 100%.

**6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

- a. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
  - 1) Mengevaluasi kembali langkah-langkah dalam pencapaian target kinerja;
  - 2) Mengkoreksi dan melakukan perubahan terhadap hal yang menjadi tidak terpenuhinya target kinerja. Dari hasil evaluasi tersebut perlu diolah, dipelajari dan dikoreksi agar terpenuhinya target kinerja;
  - 3) Melakukan konsolidasi. Konsolidasi bisa dilakukan dengan pihak internal atau eksternal. Konsolidasi ini diperlukan untuk strategi dalam mencapai target kinerja;
  - 4) Membuat perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Perencanaan yang dibuat harus perencanaan yang matang serta dapat mengantisipasi akan kendala yang terjadi;

- 5) Melakukan inovasi dan percepatan koordinasi dan sinergisitas antar bidang urusan agar terjalin komunikasi yang baik sehingga permasalahan terhadap target kinerja yang tidak tercapai ada solusinya.
- b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
  - 1) Menjalankan sistem perencanaan yang baik untuk program/kegiatan;
  - 2) Pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai rencana yang ditargetkan.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
  - 3) Meningkatkan disiplin kinerja yang baik dari seluruh staf dinas dalam melaksanakan program/kegiatan;
  - 4) Merencanakan target kinerja dengan memprediksi kondisi yang akan terjadi tahun selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini diasajikan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel II.1.

**Tabel II.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Triwulan : I, II, III, IV

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penganggung Jawab				
				K		Rp		K		Rp		I		II		III		IV		K		Rp			K		Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.02	TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN			52,215,959,771	5,601,544,743	4,735,102,141	-	664,980,305	-	1,207,115,525	-	1,189,349,031		1,445,756,663		4,507,201,524	-	10,108,746,267						Disnakerperin			
	A	BIDANG SEKRETARIAT			14,858,265,630	2,761,193,381	3,253,657,849	-	519,619,089	-	886,809,546	-	716,239,503		976,818,251	91	3,099,486,389	-	5,860,679,770									
	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM		2,849,618,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos dan jasa pengiriman surat	211 Lbr	11,308,000																							
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	74 Rek	46,195,324																							
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajaknya	36 Unit	8,777,750																							
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang dibayar	123 org	803,602,750																							

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	102	Jenis	21,235,351																		
	6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	214	Jenis	74,643,403																		
	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	41	Jenis	119,683,005																		
	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	37	Jenis	7,841,715																		
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	20	Unit	101,500,000																		
	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran yang dibeli	4518	Exemplar	26,466,075																		
	11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelayanan makan minum rapat dan tamu yang disediakan	9956	Porsi	159,524,080																		
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	169	Kali	1,112,162,620																		
	13	Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah honor THL yang dibayarkan	13	org	356,678,880																		
	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Keadaan Baik			531,218,456		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	6	Unit	106,842,000																		
	2	Pengadaan mobeliler	Jumlah mobeliler yang dibeli	0	Unit	-																		
	3	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor yang dibayarkan	29	Unit	372,092,956																		
	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang dibayarkan	47	Kali	30,678,750																		
	5	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobeliler yang dibayarkan	50	Unit	21,604,750																		
	6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah perbaikan partisi gedung kantor yang dibayarkan	0	Paket	-																		
	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap			57,594,000																		
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	129	stel	57,594,000																		
	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP			45,115,785			0															
	1	Penyusunan Laporan Pencapaian	Jumlah pembuatan LAKIP, LKPI,	28	dok	18,720,660																		

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		
	2		Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD	LPPD dan Laporan yang tersusun																				
	2		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah SOP, RENJA, IKM dan IPM OPD yang tersusun	28 dok	26,395,125																		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1	PROGRAM :	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	90	11,374,718,436	89	2,761,193,381	90	3,253,657,849	519,619,089	886,809,546	716,239,503	976,818,251	91,27	3,099,486,389	5,860,679,770							
	1	KEGIATAN :	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	80.0 %	299,554,060	100	105,397,130	80	99,903,670	22,101,300	30,112,690	16,365,500	30,691,000	100	99,270,490	204,667,620							
	1	SUB KEGIATAN :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP, RENJA, Perubahan RENJA dan IKM OPD yang disusun	8 Dok	151,338,700	4	49,297,270	4	47,065,330	1	11,223,550	1	11,616,530	1	8,246,250	1	15,530,900	4	46,617,230	8	95,914,500	100.00	63.38
	2	SUB KEGIATAN :	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun - Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	22 - Dok - kali	148,215,360	-4 -7	56,099,860	-4 -7	52,838,340	1	10,877,750	-1 -4	18,496,160	-1 -3	8,119,250	1	15,160,100	-4 -7	52,653,260	-8 -14	108,753,120	100.00	73.38
	2	KEGIATAN :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	80.0 %	5,072,431,544	100	2,194,167,318	80	2,372,480,665	403,903,901	682,665,407	596,516,539	560,842,435	100	2,243,928,282	4,438,095,600							

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			K		Rp	
					1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11			12 = 8+9+10+11		13 = 6+12	
	3	SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan yang dibayarkan - Jumlah honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan - Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan	48	- Org - Org - Org	5,072,431,544	43	2,194,167,318	39	2,372,480,665	44	403,903,901	43	682,665,407	43	596,516,539	39	560,842,435.00	39	2,243,928,282	82	4,438,095,600	170.83	87.49				
	3	KEGIATAN : ADMINISTRASI Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap	100.00	%	10,000,000	0	0	10	10,095,080		0		0			9,880,000	10	9,880,000	19	9,880,000	0	0					
	4	SUB KEGIATAN : PENGADAAN Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	20	stel	10,000,000			19	10,095,080							19	9,880,000	19	9,880,000	19	9,880,000						
	4	KEGIATAN : ADMINISTRASI Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional Kantor	80.00	%	390,957,640	90	207,417,067	80	403,923,050		32,820,914		87,006,215		15,528,160		268,184,840	10	403,540,129		610,957,196						
	5	SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	12	Jenis	4,009,820	6	2,004,890	7	4,003,300	6	2,004,910					1	1,998,390	7	4,003,300	13	6,008,190	108.33	149.84				
	6	SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	2	Unit	30,000,000	2	3,706,660										-	-	2	3,706,660	100.00	12.36					
	7	SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibeli	166	Jenis	77,699,160	83	54,480,800	86	48,848,960	37	11,760,780	48	18,345,540		4,535,960	1	14,061,780	86	48,704,060	169	103,184,860	101.81	132.80				
	8	SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	20	Jenis	45,727,540	10	22,800,350	9	27,863,230	5	6,687,080	4	11,297,050		3,122,200		6,715,000	9	27,821,330	19	50,621,680	95.00	110.70				

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100				
1	9	SUB KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	2,032	Exemplar	12,009,120	1,016	6,004,560	1,016	6,004,560	180	1,051,980	240	1,418,400			596	3,534,180	1,016	6,004,560	2,032	12,009,120	100,000	100,000		
	10	SUB KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan	1,200	Porsi	21,000,000	600	10,498,950	780	13,500,000			148	2,589,400	160	5,535,000	472	5,263,500	780	13,387,900	1,380	23,886,850	115,000	113,750		
	11	SUB KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	36	Kali	200,512,000	20	107,920,857	50	303,703,000	10	11,316,164	5	53,355,825		2,335,000	35	236,611,990	50	303,618,979	70	411,539,836	194,400	205,240		
	5	KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memakai barang milik daerah	100,00	%	5,082,522,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12	SUB KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	2	Unit	40,000,000																				
	13	SUB KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang dibeli	2	Unit	22,573,300																				
	14	SUB KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan tanah yang dibeli	1	Paket	5,019,948,820																				
	6	KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	80,00	%	288,375,872	80	141,232,362	80	263,026,784		44,598,109		54,734,034		64,463,815		75,197,728	100	238,993,686		380,226,048				
	15	SUB KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah benda pos yang dibeli - Jumlah buku cek yang dibeli	756	- Lbr - Buku	4,428,000	72	1,750,000	57	570,000			20	200,000			37	370,000	57	570,000	129	2,320,000	17,060	52,390		
	16	SUB KEGIATAN : SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi yang dibayarkan	24	Rek	47,760,000	12	18,894,610	2	144,179,664	2	24,596,993	2	26,871,235	2	35,303,678	2	34,105,012	2	120,876,918	14	139,771,528	58,330	292,650		

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		
	17	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah honorarium THL yang dibayarkan - Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	404	- Org THL - Porsi 236,187,872	63 4	120,587,752	40 4	118,277,120	94	20,001,116	94	27,662,799	94	29,160,137	12 2	40,722,716	40 4	117,546,768	1,03 8	238,134,520	256,9 3	100,82	
	7	KEGIATAN :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan sarana prasarana kantor yang dibayarkan	80.0 0	% 230,877,200	80	112,979,504	80	104,228,600		16,194,865		32,291,200		23,365,489		32,022,248	10 0	103,873,802		216,853,306			
	18	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan	1	Unit 78,380,000	1	38,998,710	1	39,190,000	1	7,651,903	1	5,811,000	1	10,555,010	1	15,055,000	1	39,072,913	2	78,071,623	200,0 0	99,6 1	
	19	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan	12	Unit 118,800,000	12	57,196,944	12	59,400,000	12	8,542,962	12	22,811,600	12	10,885,479	12	16,967,248	12	59,207,289	24	116,404,233	200,0 0	97,9 8	
	20	SUB KEGIATAN :	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang dibayarkan	96	Buah 11,277,200	48	5,630,600	48	5,638,600			30	3,668,600	18	1,925,000			48	5,593,600	96	11,224,200	100,0 0	99,5 3	
	21	SUB KEGIATAN :	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dibayarkan	34	Unit 22,420,000	17	11,153,250											-	-	17	11,153,250	50,00	49,7 5	

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
Menurunnya Angka Pengangguran	B	BIDANG TENAGA KERJA			6,167,77 3,534		199,815, 241		350,451, 082		29,739, 866		104,757, 920		155,137, 709		38,451,2 48		328,086, 743		527,901, 984		-	-
	V	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	- Jumlah Tenaga Kerja Yang Berwirausaha - Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Wirausaha		1,803,50 2,841		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	1. Jumlah peserta pelatihan menjahit tingkat pengembangan gorden & bad cover 2. Jumlah peserta pelatihan menjahit tingkat pengembangan busana 3. Jumlah peserta pelatihan elektronik 4. Jumlah peserta pelatihan seleksi magang ke Jepang 5. Jumlah peserta pelatihan las 6. Jumlah peserta pelatihan desainer 7. Jumlah peserta pelatihan pengolahan daging sapi 8. Jumlah peserta pelatihan sepeda motor 9. Jumlah peserta	307 org	1,757,365, 641																			

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15			
			pelatihan tata boga																								
	2		Kegiatan Validasi Database Tenaga Kerja Daerah	Jumlah validasi pemutakhiran data tenaga kerja Kota Payakumbuh	10 Buku	46,137,200																					
Menurunnya Angka Pengangguran	II	PROGRAM :	PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 dok	1,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	8	KEGIATAN :	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RTK) yang disusun	1 dok	1,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	22	SUB KEGIATAN :	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dok	500,000																					
	23	SUB KEGIATAN :	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dok	500,000																					
	III	PROGRAM :	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	- Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha - Jumlah tenaga kerja yang diserap wirausaha	-50 -75 - org - org	145,297,890	-20 -35	69,729,350	-50 -75	210,583,010		1,463,000		63,260,421		126,354,460		2,505,000		-99 -75	193,582,881		0	263,312,231		0	0
	9	KEGIATAN :	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bersertifikasi	16 org	145,297,890	25	69,729,350	48	210,583,010		1,463,000	16	63,260,421	32	126,354,460		2,505,000	48	193,582,881		73	263,312,231	456.25	181.22		
	24	SUB KEGIATAN :	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan menjahit tingkat pengembangan busana	16 Org	145,297,890	25	69,729,350	48	210,583,010		1,463,000	16	63,260,421	32	126,354,460		2,505,000	48	193,582,881		73	263,312,231	456.25	181.22		

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		
	VI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan		3,775,237,564	-	-			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah penerima informasi pasar tenaga kerja	503 org	381,073,016																			
	2	Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah penempatan tenaga kerja siap pakai	66 org	598,387,711																			
	3	Kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Propinsi	Jumlah penempatan tenaga kerja luar propinsi	168 org	2,795,776,837																			
	IV	PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	261 org	229,173,974	215	110,235,391	261	119,549,772	14,885,466	40,164,499	27,169,249	33,319,968	297	115,539,182	0	225,774,573	0	0					
	10	KEGIATAN : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	20 org	1,999,680	0	0	20	32,411,440		20	21,221,050	3,165,200	6,922,300	20	31,308,550		31,308,550						
	25	SUB KEGIATAN : Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta pelatihan perhotelan	20 Org	999,840																			
	26	SUB KEGIATAN : Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah kesempatan kerja bagi peserta pelatihan	20 Org	999,840			20	32,411,440		20	21,221,050	3,165,200	6,922,300	20	31,308,550	20	31,308,550						
	11	KEGIATAN : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Bursa Kerja	250 org	227,174,294	465	110,235,391	250	87,138,332	14,885,466	18,943,449	24,004,049	26,397,668	587	84,230,632		194,466,023							
	27	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	- Jumlah honorarium THL yang dibayarkan - Jumlah pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online - Jumlah pemeliharaan dan operasional aplikasi	5 - Org - Unit komputer - Unit printer	89,827,547	5	84,932,491											5	84,932,491	100.00	94.55			

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
			informasi pasar kerja online																					
	28	SUB KEGIATAN : Pelayan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	- Jumlah honorarium THL pelayan IPK yang dibayarkan - Jumlah peserta sosialisasi informasi pasar kerja online	203	- Org THL - Org 137,346,747	180	25,302,900	3	87,138,332	3	14,885,466	3	18,943,449	3	24,004,049	3	26,397,668	3	84,230,632	183	109,533,532	90.15	79.75	
	VI I	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Penurunan Angka PHK		170,325,425		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1. Jumlah kasus perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja yang difasilitasi 2. Jumlah pemetaan kerawanan hubungan industrial di perusahaan yang disusun 3. Jumlah perusahaan peserta bimtek syarat kerja	17	Kasus 52,105,870																			
	2	Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1. Jumlah peserta sosialisasi peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja 2. Jumlah penyuluhan oleh tim terpadu kepatuhan norma ketenagakerjaan	295	Perusahaan 118,219,555																			

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		
	V	PROG RAM :	HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	3	Kasus 43,235,840	3	19,850,500	3	20,318,300		13,391,400		1,333,000		1,614,000		2,626,280	1	18,964,680	0	38,815,180	0	0	
	12	KEGIATAN :	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	3	Kasus 43,235,840	3	19,850,500	1	20,318,300		13,391,400		1,333,000		1,614,000		2,626,280	1	18,964,680		38,815,180			
	29	SUB KEGIATAN :	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan peserta sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100	Perusahaan 35,077,040	42	15,923,000	50	16,238,900	50	12,211,000		300,000		1,273,000		1,369,280	50	15,153,280	92	31,076,280	92.00	88.59	
	30	SUB KEGIATAN :	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja yang difasilitasi	10	Kasus 8,158,800	3	3,927,500	1	4,079,400		1,180,400		1,033,000	1	341,000		1,257,000	1	3,811,400	4	7,738,900	40.00	94.85	
	C		BIDANG PERINDUSTRIAN			31,189,920,607		2,640,536,121		1,130,993,210	-	115,621,350	-	215,548,059	-	317,971,819		430,487,164		1,079,628,392	-	3,720,164,513	-	-	
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	VI II		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk		1,174,134,745		-		-															

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	1	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Pengujian dan Kualitas	Jumlah peningkatan daya saing melalui pelaksanaan sertifikasi, legalitas usaha dan jaminan mutu produk dengan kegiatan sbb : 1. Jumlah fasilitasi sertifikasi halal, HAKI (Pendaftaran Merek) 2. Jumlah uji labor pada makananan	116	IKM	390,210,4																		
	2	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	1. Jumlah pelatihan/work shop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui TTG 2. Jumlah sosialisasi dan workshop bata ringan bagi IKM batu bata Kota Payakumbuh	60	IKM	126,542,2																		
	3	Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	1. Jumlah pelatihan fashion/francing busana kolaborasi tenun, sulam dan bordir 2. Jumlah bantuan bahan percontohan bordir 3. Jumlah magang usaha kerajinan	45	IKM	657,382,0																		
	IX	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Produk Yang Memperoleh Umpan Balik			66,127,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15	
	1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah Pembinaan IKM Pendamping GKM, Terlaksananya Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) di IKM	10	IKM	64,048,150																			
	2	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen kajian dan aksi pengembangan makanan spesifik daerah (Rendang) menuju pasar global	15	IKM	2,079,500																			
	X	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1. Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna 2. Persentase Peningkatan Nilai Produksi			1,146,434,026		-	0																
	1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	1. Jumlah IKM terbina melalui klinik konsultasi bisnis 2. Jumlah peserta pelatihan peningkatan daya saing melalui efisiensi dan efektifitas usaha	145	IKM	615,512,475																			
	2	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah peserta pelatihan kerajinan tenun/raju	68	IKM	332,032,003																			
	3	Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri	1. Jumlah peserta workshop dan sertifikasi kompetensi untuk IKM 2. Jumlah	40	IKM	198,889,548																			

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100			
				peserta workshop peningkatan penguasaan teknologi IKM																						
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	VI	PROG RAM :	PRERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- Persentase industri yang menerapkan Teknologi Tepat Guna - Persentase sentra/klaster industri yang tertata	- 3.35 - 60.00	- % - %	7,318,30 7,650	- 2.1 - 40.00	2,603,70 1,031	- 3.3 - 60.00	1,069,86 3,440	0	112,06 1,580	0	214,855, 059	0	317,971, 819	374,165, 244	- 0,5 2 - 75	1,019,05 3,702	0	3,622,75 4,733	0	0		
	13	KEGIA TAN :	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang disusun - Jumlah dokumen penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang disusun (UPTD P3R)	- 4 - 1	- Dok - Dok	7,318,30 7,650	- 4 - 1	2,603,70 1,031	- 4 - 1	1,069,86 3,440		112,06 1,580		214,855, 059		317,971, 819	374,165, 244	- 4 - 1	1,019,05 3,702		3,622,75 4,733				
	31	SUB KEGIA TAN :	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan Industri Kota yang tersusun	1	Dok	5,000,000																			
	32	SUB KEGIA TAN :	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Sinergisitas pembinaan dan pengembangan IKM dengan Dekrenasda Kota Payakumbuh	1	Tahun	605,372,0 40	3	288,267, 156	2	367,603, 450		3,384,9 90		52,029,0 00		157,733, 500	2	120,397, 588	2	333,545, 078	5	621,812,2 34	500,0 0	102, 72	
	33	SUB KEGIA TAN :	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	Jumlah peserta pelatihan/workshop penguatan peralatan produksi bagi	20	IKM	94,217,01 0	10	27,628,0 50	10	30,108,4 15			10	29,572,0 80					10	29,572,0 80	20	57,200,13 0	100,0 0	60,7 1	

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
		Industri	IKM melalui TTG																					
	34	SUB KEGIATAN : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Operasional Sentra IKM Randang (UPTD P3R) - Operasional Sentra IKM Randang (UPTD P3R)	17	- Org THL - Rek 1,213,703,048	1	544,546,755	13	535,312,899	15	90,843,092	15	108,022,047	13	102,188,477	13	220,055,312	13	521,108,928	14	1,065,655,683	82.35	87.80	
	35	SUB KEGIATAN : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Jumlah honorarium THL yang dibayarkan - Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan keterkaitan produksi industri dari hulu ke hilir	34	- Org THL - IKM 380,066,732	34	181,592,393	19	136,838,676	4	17,833,498	4	25,231,932	19	58,049,842	4	33,712,344	19	134,827,616	53	316,420,009	155.88	83.25	
	36	SUB KEGIATAN : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah pengadaan peralatan pendukung produksi	1	Paket 5,019,948,820	7	1,561,666,677													7	1,561,666,677	700.00	31.11	
	XI	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah Produk Industri Yang Mendapat Sertifikat Produk		21,350,022,476		-		-				2,079,000				168,965,760		181,724,070		292,229,340		1.37	
	1	Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu Hilir	Jumlah sinergisitas pembinaan dan pengembangan IKM dengan Dekranasda Kota Payakumbuh	4	Paket 1,302,601,286																			
	2	Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra Industri	8	Paket 14,588,615,760																			
	3	Kegiatan Operasional Rumah Produksi dan Galery Tenun	Jumlah operasional Rumah Produksi dan Galery Tenun	2	Unit 343,916,938																			

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100			
	4	Kegiatan Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir	Jumlah keikutsertaan event	14	Event	1,759,776,705																			
	5	Kegiatan Revitalisasi IKM Kota Payakumbuh	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Kota Payakumbuh	1	Paket	432,350,079																			
	6	Operasional Sentra Rendang	Operasional sentra IKM rendang	2	Unit	2,875,802,533																			
	7	Pendataan Potensi IKM Kota Payakumbuh	Dokumen data IKM Kota Payakumbuh	1	Dok	46,959,175																			
VI	I	PROG RAM : PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	- Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk - Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk	- 2,75 - 1	- % - bh	74,460,060	- 2,2 - 9	36,835,090	- 2,7 5 - 1	61,129,770	3,559,770	693,000	0	56,321,920	- 8,4 0 - 6	60,574,690	0	97,409,780	0						
	14	KEGIA TAN : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	7	IKM	74,460,060	9	36,835,090	6	61,129,770	3,559,770	693,000	0	6	56,321,920	6	60,574,690	97,409,780							
	37	SUB KEGIA TAN : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Jumlah peningkatan daya saing melalui pelaksanaan sertifikasi, legalitas dan jaminan mutu	7	IKM	74,460,060	9	36,835,090	6	61,129,770	3,559,770	693,000		6	56,321,920	6	60,574,690	15	97,409,780	214	130,82				

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		
		Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	produk dengan kegiatan sbb : Jumlah fasilitasi sertifikasi halal																					
	XI 1	Program Pengembangan Sentra - sentra Industri Yang Tertata Potensial	Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata		40,434,000	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Di Akses Masyarakat	Jumlah penyediaan informasi sentra rendang	1	Sentra 40,434,000	-	-																	
	VI II	PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah izin usaha yang diawasi dari jumlah izin yang dikeluarkan 2 tahun sebelumnya	25	IUI 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15	KEGIATAN : Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan informasi industri yang disusun	3	Dok 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	38	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dokumen data IKM Kota Payakumbuh	1	Dok 10,000,000																			
	39	SUB KEGIATAN : Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota	Sosialisasi data yang dilakukan	100	Unit Usaha 5,000,000																			

Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
		melalui SIINAS																						
	40	SUB KEGIATAN :	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Pemantauan dan evaluasi izin usaha industri yang dilakukan	50	Izin	5,000,000																	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan

### **3. Bidang Tenaga Kerja**

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Tenaga Kerja;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

### **4. Bidang Perindustrian**

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Industri;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Industri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Pangan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan

#### **5. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)**

Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.

Fungsi :

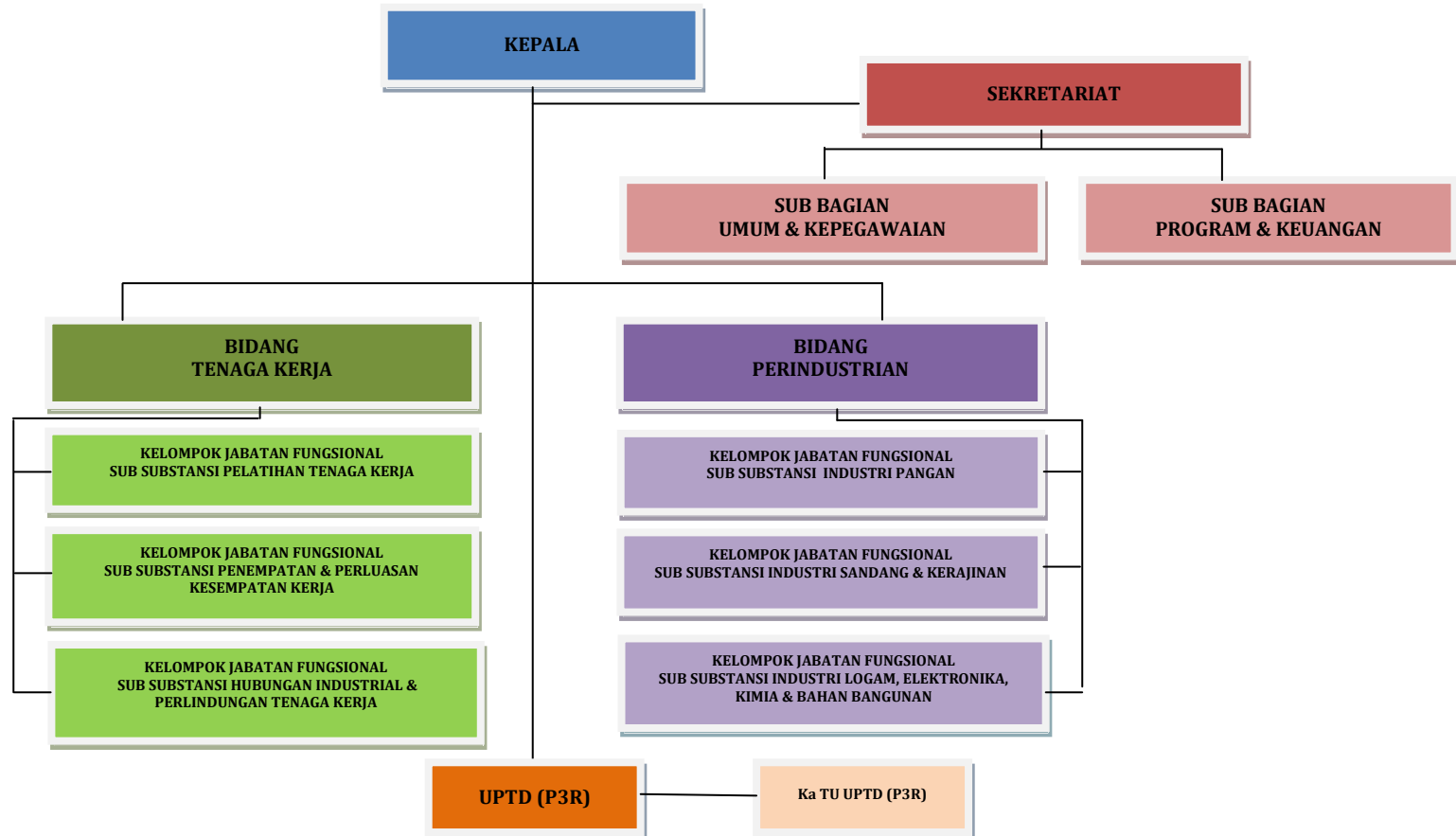
- a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
- c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 51 TAHUN 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



A. Urusan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Wajib Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ditetapkan 1 (satu) IKU untuk urusan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja, dengan rumusan jumlah penduduk usia kerja Tahun n dibagi jumlah angkatan kerja Tahun n dikali seratus persen

Hasil analisis pencapaian indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2022 realisasi sebesar 94,84% dari target yang ditetapkan sebesar 93,75%, yaitu 70.127 orang jumlah penduduk usia kerja Tahun 2022 dengan 73.939 orang jumlah angkatan kerja Tahun 2022.

Faktor pendukung dan program tersebut diatas melalui APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. Untuk Tahun 2022 kegiatan berupa pelatihan processing roti/kue dengan peserta 16 orang, yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei sampai dengan 11 juni 2022 dan pelatihan menjahit dasar dengan peserta 32 orang, angkatan I dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 20 Agustus 2022 dan angkatan II dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 13 September 2022. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Ruang Work Shop BLK Kota Payakumbuh.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Kegiatan dengan Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.
  - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja  
Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan kewirausahaan dengan jumlah peserta 20 orang dan Kegiatan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2022 yang dibuka

oleh Pj. Walikota Payakumbuh dan dihadiri juga oleh Kepala UPT BP3MI Sumatera Barat yang bertempat di Aula Balaikota Payakumbuh dengan peserta 100 orang dan sosialisasi kepada siswa SMK se Kota Payakumbuh dan pengelola BKK (Bursa kerja Khusus) yang dilaksanakan tanggal 29 November 2022 di SMKN2 Payakumbuh dengan peserta 100 orang.

➤ Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan pembuatan AK-1 bagi pencari kerja yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Informasi Bursa Kerja Online tentang lowongan pekerjaan melalui sistem Ketenagakerjaan (SISNAKER) Kementerian Tenaga Kerja. Melalui aplikasi Siskejaer ini, seluruh masyarakat pencari kerja dan masyarakat usia kerja dapat memperoleh segala bentuk informasi terkait dengan ketenagakerjaan, seperti Lowongan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan dll. Selain melalui aplikasi Siskejaer, penyebaran informasi bursa kerja melalui media sosial seperti Facebook, Instagram Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

3. Program Hubungan Industrial pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana dari 1 kasus yang ditargetkan untuk difasilitasi penyelesaiannya hanya 1 kasus yang masuk.

B. Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pilihan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ditetapkan 1 (satu) IKU untuk urusan Perindustrian yaitu :

1. Peningkatan Nilai Produksi, dengan rumusan nilai produksi Th (n)-nilai produksi Th (n-1) dibagi nilai produksi Th (n-1) kali seratus persen  
Hasil analisis pencapaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,1% dari target yang ditetapkan sebesar 3,00%. Yaitu nilai produksi Tahun 2021 sebesar Rp. 296.463.459.000,- mengalami kenaikan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 305.581.059.000,-.

Faktor pendukung dan program tersebut diatas melalui APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu :

- Pembuatan Buku Memori Dekranasda Kota Payakumbuh Tahun 2022-2022 dan Buku Tenun Balai Panjang.
- Mengikuti Minangkabau Fashion Heritage 2022 di Jakarta yang melibatkan disainer Kota Payakumbuh Berry Mirsha dan Hilman Samudera dengan tema Djembatan dengan 10 stel desain.

- Mengikuti even Minangkabau Fashion Festival 2022 di Padang
- Gallery Kriya Dekranasda di Mall Pelayanan Kota Payakumbuh
- Kegiatan Pelatihan dan Workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui TTG  
Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 14 Juni sampai dengan 16 Juni 2022 yang dilaksanakan di Bengkel Surau Pandam Teknik di Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur dengan Instruktur pelatihan/narasumber dari Indra Kesuma Beni Anwar/Payakumbuh Welder yang sudah berlisensi BNSP. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang peserta IKM las baru.
- Kegiatan Workshop Diversifikasi Produk Tenun, dilaksanakan pada tanggal 8 Juli sampai dengan 14 Juli 2022 di Aula Sentra Rendang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Jalan Gelatik Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara dengan Instruktur : Remon Nofita.  
Dengan peserta 15 orang yang berasal dari IKM Kerajinan Tenun Kota Payakumbuh.
- Kegiatan UPTD P3R Sentra Rendang
  - Operasional Rutin. Operasional rutin terkait dengan penyelenggaraan administrasi tata usaha, praktek produksi, kebersihan, rapat penyambutan tamu, pembayaran listrik, belanja jasa (operator mesin, kebersihan dan keamanan);
  - Pemeliharaan. Pekerjaan ini meliputi pemeliharaan alat-alat dapur, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga serta pemeliharaan gedung kantor;
  - Kegiatan produksi rendang.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu :

Fasilitasi IKM dalam pendaftaran sertifikat halal, untuk Tahun 2022 yang ditarget pendaftaran tercapai 100%, dari target 6 IKM/Kelompok Produk, terealisasi 6 IKM/Kelompok Produk.

Pada kegiatan ini ditetapkan penerima bantuan pembiayaan sertifikasi IKM sebanyak 6 pelaku usaha/kelompok produk.

No	Nama IKM	Nama Pimpinan	Jenis Produk	Alamat
1	Rendang Makyus	Wahyu Hidayat	Daging dan produk olahan daging	Kel. Parak Batuang
2	Rendang Mala	Titin Risti Atmala Sari	Daging dan Produk Olahan Daging	Balai Batimah, Payakumbuh Timur
3	PT. Kampung Guci Artisan	Cherry Lenggogeni	Daging dan produk olahan daging	Parak Batuang, Payakumbuh Barat
4	Yo Randang	Yelsi	Bumbu dan Kondimen	Kel. Tanjung Gadang Sungai Pinago
5	Datona Cookies	Ermawilis	Produk Bakeri	Kel. Napar, Kec. Payakumbuh Utara
6	Aryona	Adriati	Minuman botanikal / rempah (Bentuk padat / cair)	Kel. Koto Tangah

Untuk Tahun Anggaran 2024, merupakan tahun ke 2 (kedua) dari Rencana Strategis Empat Tahun (2023-2026) yang memuat Program dan Kegiatan untuk menindaklanjuti pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh periode 2023-2026 dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang dilengkapi indikator capaian kinerja terukur dari masing-masing program dan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja Dinas berdasarkan Perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja berdasarkan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II.2.

**Tabel II.2**  
**KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Menurunnya angka pengangguran			Tingkat pengangguran	%	6.62	6.47			4.11	6,68					
				Persentase penempatan tenaga kerja formal	%	51.00	57.00			51.17	65,52					
				Persentase penyerapan tenaga kerja informal	%	25.00	33.00			26.17	43,89					
				Persentase penyerapan tenaga kerja	%			93,55	93,75			98,96	94,84	93,75	93,75	
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	6.02	6.08			5.60	6,6					
				Persentase peningkatan nilai produksi	%	1.50	2.00	2,50	3,00	1.65	-13,8%	15,32	3,1	3,00	3,25	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Hasil penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

### 1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa realisasi capaian Tahun 2022 belum dapat diukur sebagian besar dikarenakan memerlukan sinkronisasi, konsolidasi serta sinergisitas dari stakeholder atau lintas sektor terkait dengan data capaian indikator kinerja. Adapun hal perlu perhatian terdapat pada :

a. Indikator persentase penyerapan tenaga kerja

Terjadi peningkatan serapan tenaga kerja dari target yang di tetapkan sebesar 93,75% dengan terealisasi sebesar 94,84% dengan peningkatan capaian sebesar 1,09%, hal ini di sebabkan banyaknya penduduk usia kerja yang mendapatkan lowongan pekerjaan dari perusahaan sehingga formasi dapat di penuhi oleh pencari kerja sesuai dengan keahlian yang di butuhkan.

b. Indikator persentase peningkatan nilai produksi

Nilai investasi sektor industri di Kota Payakumbuh diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah IKM di Kota Payakumbuh. Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh sedikit melebihi target yaitu 3,1%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha. Sebagai gambaran di tahun 2021 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 1.928 unit usaha, akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.000 unit usaha, meningkat lebih kurang 72 IKM (3,73%). Dengan peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

## 2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Keterbatasan SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 2) Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
- 3) Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
- 4) Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja;
- 5) Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, karena tidak memiliki kompetensi/kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- 6) Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga kerja, jaminan kesehatan/keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja, hak-hak pensiun);
- 7) Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah;
- 8) Masih adanya hubungan kerja yang kurang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja;
- 9) Masih rendahnya daya saing pencari kerja siap pakai;
- 10) Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru;
- 11) Belum memadainya kapasitas wirausaha untuk pengembangan usaha;
- 12) Masih rendahnya kesadaran pemahaman akan kewajiban mendaftarkan lowongan kerja ke Disnakerperin;
- 13) Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pemberi kerja;
- 14) Rendahnya produktifitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), disebabkan oleh :
  - a. Belum optimalnya penerapan teknologi industri;
  - b. Rendahnya kualitas SDM pelaku industri.
- 15) Terbatasnya kualitas produk IKM, disebabkan oleh :
  - a. Masih rendahnya kualitas input bahan baku dan bahan penolong;
  - b. Masih rendahnya mutu produk akibat dari rendahnya standadisasi proses produksi;
  - c. Masih kurangnya sinergisitas antara pelaku industri dan pemasok bahan baku yang berkualitas.

- 16) Belum optimalnya pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Payakumbuh, disebabkan oleh :
  - a. Promosi produk yang belum optimal;
  - b. Belum adanya sistem khusus yang mendukung pemasaran produk-produk IKM Kota Payakumbuh;
  - c. Belum adanya sinergi antara industri kecil, menengah dan besar dalam kerjasama produksi maupun pemasaran.
- 17) Minimnya akses modal bagi pelaku usaha :
  - a. Kebijakan investasi (penanaman modal) yang belum maksimal;
  - b. Belum kuatnya lembaga/keompok industri pada kegiatan usaha bersama.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah :

- 1) Pengaruh globalisasi disemua sektor utama berlakunya era perdagangan bebas kawasan ASEAN;
- 2) Lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global sehingga menghambat dalam penciptaan lapangan kerja;
- 3) Kemampuan penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi atau komunikasi yang belum mampu bersaing dengan daerah atau negara lain;
- 4) Keterbatasan data konkret dan akurat terkait ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh serta kebijakan yang belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta dalam penyerapan tenaga kerja;
- 5) Peningkatan kembali kasus Covid -19 sampai dengan pertengahan Tahun 2022 ini yang melanda hampir seluruh dunia yang berdampak langsung terhadap urusan Ketenagakerjaan dan urusan Perindustrian;
- 6) Dengan adanya kenaikan harga BBM yang membawa dampak kepada produksi produk IKM.

### **3. Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan**

Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan

a. Terhadap Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

Tingkat kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang merupakan upaya dalam rangka penvapaian tujuan dan sasaran Kota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, yang mana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mendukung pelaksanaan tujuan yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, yang sasarannya yaitu Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran dan Meningkatnya Sektor Strategis.

Adapun dampak kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Kota Payakumbuh dapat dilihat dari meningkatnya target setiap tahunnya dan tercapainya realisasi fisik dan penyerapan anggaran yang tepat waktu.

- Terjadi peningkatan serapan tenaga kerja dari target yang di tetapkan sebesar 93,75% dengan terealisasi sebesar 94,84% dengan peningkatan capaian sebesar 1,09%, hal ini di sebabkan banyaknya penduduk usia kerja yang mendapatkan lowongan pekerjaan dari perusahaan sehingga formasi dapat di penuhi oleh pencari kerja sesuai dengan keahlian yang di butuhkan;
- Nilai investasi sektor industri di Kota Payakumbuh diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah IKM di Kota Payakumbuh. Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh sedikit melebihi target yaitu 3,1%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha. Sebagai gambaran di tahun 2021 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 1.928 unit usaha, akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.000 unit usaha, meningkat lebih kurang 72 IKM (3,73%). Dengan peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di

tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

#### **4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

Memperhatikan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya, disimpulkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian meliputi :

- a) Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja;
- b) Keterbatasan lapangan kerja yang mengakibatkan potensi pengangguran lulusan sekolah atau perguruan tinggi meningkat;
- c) Hubungan industrial yang tidak kondusif menyebabkan penurunan produktifitas kerja;;
- d) Masih adanya pelanggaran norma dan syarat kerja;
- e) Belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan UMR;
- f) Belum optimalnya peningkatan daya saing usaha, terutama untuk IKM;
- g) Belum sinergisnya pengelolaan limbah industri kecil dengan lintas sektoral;
- h) Minimnya investasi di Sektor Sarana Perindustrian.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian meliputi :

- a) Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pembangunan bidang ketenagakerjaan dan bidang perindustrian;
- b) Ketersedian gedung Balai Latihan Kerja dan sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- c) Terjalinnnya hubungan yang baik dengan mitra ketenagakerjaan (Bipartit dan Tripartit);

- d) Potensi daerah lain dalam menyerap tenaga kerja;
- e) Tingginya motivasi masyarakat untuk berwirausaha;
- f) Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh dalam 3 tahun terakhir;
- g) Letak geografis Payakumbuh yang strategis pada perlintasan jalur ekonomi antara provinsi Sumatera Barat dengan Riau;
- h) Kebijakan Nasional tentang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i) Terbinanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di tingkat provinsi.

#### **5. Formulasi Isu-isu Penting**

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain :

- 1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja sehingga mampu diserap oleh pangsa pasar, dapat didukung melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
- 2) Dalam rangka meningkatnya penyerapan tenaga kerja, melalui Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- 3) Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, melalui Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- 4) Dalam rangka meningkatkan nilai produksi industri pengolahan, melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
- 5) Dalam rangka meningkatnya jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk, melalui Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Diperoleh beberapa isu utama (**Isu-isu Strategis**) yang menjadi tolak ukur penyelenggaraan fungsi dan tugas kedinasan secara menyeluruh, diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses yang dilakukan dalam review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan. Proses tersebut dilakukan adalah dalam upaya mensinergikan perencanaan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Kota Payakumbuh dengan Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah.

Alasan proses tersebut dilakukan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan

daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II.3.

**Tabel II.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4,149,204,792	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4,421,613,489	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	A	3,535,190,392	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	A	3,746,197,649	
			Nilai IKM	91				Nilai IKM	91		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	116,948,790	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	122,796,230	
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	14,863,840	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	15,607,032	
2)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	102,084,950	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	107,189,198	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	2,733,286,850	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	2,869,951,193	
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	2,469,034,850	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	2,592,486,592.50	
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	264,252,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	277,464,600.00	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	12,600,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	13,860,000	
5)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21 paket	12,600,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21 paket	13,860,000	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	204,016,040	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	224,417,644	
6)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	1,998,150	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	2,197,965	
7)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	30,220,950	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	33,243,045	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	19,344,380	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	21,278,818	
9)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	6,004,560	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	6,605,016	
10)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	10,500,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	11,550,000	
11)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	135,948,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	149,542,800	
5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>72,967,000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>80,263,700</b>	
12)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	28,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30,800,000	
13)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	44,967,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	4 unit	49,463,700	
6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>80%</b>	<b>285,173,112</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>80%</b>	<b>313,690,423</b>	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	167,880,752	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	184,668,827	
15)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	117,292,360	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	129,021,596	
7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan</b>	<b>80%</b>	<b>110,198,600</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan</b>	<b>80%</b>	<b>121,218,460</b>	
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,190,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43,109,000	
17)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	59,400,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	65,340,000	
18)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 unit	5,638,600	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 unit	6,202,460	
19)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	5,970,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6,567,000	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,81%	59,621,390	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,81%	65,583,529	
8	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,81%	59,621,390	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,81%	65,583,529	
20)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	1 dok	49,581,790	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	1 dok	54,539,969	
21)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 perusahaan	10,039,600	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 perusahaan	11,043,560	
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,95%	412,189,118	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,95%	453,408,030	
9	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	404,653,798	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	445,119,178	
22)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 orang	404,653,798	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 orang	445,119,178	
10	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70%	7,535,320	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70%	8,288,852	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23)	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 lembaga	7,535,320	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 lembaga	8,288,852	
4	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>46,45%</b>	<b>114,586,442</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>46,45%</b>	<b>126,045,086</b>	
11	<b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan</b>	<b>46,45%</b>	<b>27,448,160</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan</b>	<b>46,45%</b>	<b>30,192,976</b>	
24)	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	27,448,160	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	30,192,976	
12	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja</b>	<b>80%</b>	<b>87,138,282</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja</b>	<b>80%</b>	<b>95,852,110</b>	
25)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 orang	87,138,282	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 orang	95,852,110	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03%	27,617,450	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03%	30,379,195	
13	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75%	27,617,450	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75%	30,379,195	
26)	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	23,538,300	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	25,892,130	
27)	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	4,079,150	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	4,487,065	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,460,387,798	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,606,426,578	
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	1,206,718,018	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	1,327,389,820	
			Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata	20%				Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata	20%		
14	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	1,206,718,018	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	1,327,389,820	
28)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	338,487,870	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	372,336,657	
29)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	31,108,220	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	34,219,042	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (UPTD P3R)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	507,653,962	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (UPTD P3R)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	558,419,358	
31)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	179,467,966	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	197,414,763	
32)	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	150,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	165,000,000	
7	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk</b>	<b>2,50%</b>	<b>178,669,780</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk</b>	<b>2,50%</b>	<b>196,536,758</b>	
15	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Pelaku Industri yang Difasilitasi	6 IKM	178,669,780	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Pelaku Industri yang Difasilitasi	6 IKM	196,536,758	

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33)	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	178,669,780	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	196,536,758	
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas</b>	<b>1 perusahaan</b>	<b>75,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas</b>	<b>1 perusahaan</b>	<b>82,500,000</b>	
16	<b>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penyediaan Informasi Daerah</b>	<b>33,33%</b>	<b>75,000,000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penyediaan Informasi Daerah</b>	<b>33,33%</b>	<b>82,500,000</b>	
34)	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 dokumen	75,000,000	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 dokumen	82,500,000	
<b>TOTAL</b>					<b>5,609,592,590</b>	<b>TOTAL</b>					<b>6,028,040,067</b>

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD :

1. Untuk menunjang program prioritas daerah yaitu Kota Payakumbuh Bersih dan WTP, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel maka terjadi rencana penyesuaian anggaran dari rancangan awal;
2. Untuk menunjang hasil Musrenbang dan Pokir, maka terjadi penambahan anggaran pada kegiatan pelatihan.

Oleh sebab itu berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 terdapat penyesuaian anggaran dengan Rencana Kerja Tahun 2024 dan disesuaikan dengan analisis kebutuhan, maka pagu indikatif Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024 lebih besar dari Rancangan Awal RKPD.

Dalam tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut diatas meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk program kegiatan. Adapun untuk besarn pagu anggaran disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam hal ini adalah APBD Kota Payakumbuh, yang mana diprioritaskan untuk program kegiatan untuk pembangunan di Kota Payakumbuh, untuk urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Yang mana Review terhadap Rancangan Awal RKPD sudah disesuaikan dengan usulan dari Musrenbang Kecamatan dan Pokir DPRD Kota Payakumbuh, terutama untuk kegiatan pelatihan yang diadakan di urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun usulan program dan kegiatan di usulkan dalam Rencana Kerja (Renja) 2024 adalah dengan memperhatikan dan menindaklanjuti arah dan kebijakan pembangunan Tujuan dan Sasaran Walikota Payakumbuh khususnya dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian dari Rencana Pembangunan Jangka

Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Walikota Payakumbuh dimaksud dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini dengan tidak lupa memperhatikan pemangku kepentingan baik dari masyarakat yang terkait langsung maupun dari Pemerintah.

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota yang ditindak lanjuti dengan Tingkat Kota, Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diusulkan atas hasil reses, serta responsive terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi OPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Tenaga Kerja dan Perindustrian, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai program dan kegiatan.

Usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat baik itu melalui Musrenbang maupun pokok pikiran DPRD yang berhubungan dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan terus diakomodir baik melalui pendanaan Kota maupun pengusulan pendanaan Provinsi maupun Pusat seperti dapat dilihat pada tabel II.4a dan II.4b.

Tabel II.4.a.1

**PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN PAYAKUMBUH TAHUN 2023  
DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Kecamatan Payakumbuh Barat</b>						
1	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Parak Batuang	Kurangnya SDM dalam masyarakat		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
2	Pelatihan Menjahit	Parak Batuang	Kurangnya SDM dalam masyarakat		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Ibuah	Pelatihan memasak kue adalah kegiatan yang akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan untuk beraktifitas diluar rumah dan pemasarannya pun dapat dilakukan secara digital atau online sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
4	Pelatihan logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan	Nunang Daya Bangun	Di butuhkan pelatihan untuk pemuda pemudi kelurahan Nunang Daya Bangun	25 orang			Ditolak, karena untuk Tahun 2024 kegiatan pelatihan yang ada merupakan lanjutan dari kegiatan pelatihan pada Tahun 2023 (Pengembangan)
5	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Parik Rantang	Membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga	50,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pelatihan Menjahit	Padang Tonga Balai Nan Duo	Meningkatnya ekonomi masyarakat dan kemiskinan ekstrim		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
7	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Padang Tongah Balai Nan Duo	Agar meningkatkan UMKM masyarakat Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pelatihan Olahan Pangan	Tanjung Pauh	Masih ada ibu muda yang belum bisa membuat variasi makanan berbahan ikan untuk bayi	25 orang	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Koto Tengah	Kompetensi wirausahawan muda yang masih sangat terbatas untuk mengembangkan usahanya		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
10	Pelatihan Menjahit	Koto Tengah	Kompetensi wirausahawan muda yang masih sangat terbatas untuk mengembangkan usahanya		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
11	Pelatihan Menjahit	Ibuh	Perlunya pengadaan petihan menjahit sebagai penunjang ekonomi masyarakat		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Nunang Daya Bangun	Dibutuhkan pelatih untuk pemuda pemudi kelurahan NDB	25 orang			Ditolak, karena untuk Tahun 2024 kegiatan pelatihan yang ada merupakan lanjutan dari kegiatan pelatihan pada Tahun 2023 (Pengembangan)
13	Pelatihan Service HP	Nunang Daya Bangun	Dibutuhkan pelatih untuk pemuda pemudi kelurahan NDB	25 orang	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
<b>II</b>	<b>Kecamatan Latina</b>						
14	Pelatihan Menjahit	Koto Panjang Padang	Kurangnya kesempatan dalam pelatihan menjahit		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
<b>III</b>	<b>Kecamatan Payakumbuh Selatan</b>						

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Pelatihan Menjahit	Padang Karambia	Masih kurangnya keterampilan menjahit bagi pemula dan lanjutan		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
16	Pelatihan logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan	Padang Karambia	Kurangnya keterampilan pemuda sehingga di perlukan pengembangan keterampilan/keahlian untuk pemuda dan pengangguran				Ditolak, karena untuk Tahun 2024 kegiatan pelatihan yang ada merupakan lanjutan dari kegiatan pelatihan pada Tahun 2023 (Pengembangan)
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Payakumbuh Timur</b>						
17	Pelatihan Kewirausahaan	Padang Tiakar	Banyaknya usia produktif yang tidak bekerja				Ditolak, untuk Tahun 2024 pelatihan kewirausahaan tidak ada, karena dana tidak mencukupi. Kegiatan Tahun 2024 sosialisasi peluang kerja ke luar negeri sesuai dengan Mou dengan BP2NI Pusat

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pelatihan Menjahit	Koto Panjang	Banyaknya minat warga yang berkeinginan mengikuti keterampilan menjahit dan membantu ekonomi keluarga		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
19	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Koto Panjang	Banyaknya minat warga yang berkeinginan mengikuti keterampilan menjahit dan membantu ekonomi keluarga		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan untuk 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
<b>V</b>	<b>Kecamatan Payakumbuh Utara</b>						
20	Pelatihan Kewirausahaan	Tigo Koto Diate	Untuk penurunan angka kemiskinan perlu diadakan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda sehingga kualitas SDM dapat ditingkatkan untuk mengembangkan usahanya				Ditolak, untuk Tahun 2024 pelatihan kewirausahaan tidak ada, karena dana tidak mencukupi. Kegiatan Tahun 2024 sosialisasi peluang kerja ke luar negeri sesuai dengan Mou dengan BP2NI Pusat

**Tabel II.4.a.2**  
**PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN DAN E-POKIR TAHUN 2023**  
**DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	E-POKIR				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Pengusul dan Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Menjahit	EDWAR D.F, S.Sos		Rp. 45.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD
2	Pelatihan Kewirausahaan (Pelatihan Perbengkelan)	ISMET HARIUS, S.Sos		Rp. 80.000.000	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	452,344,205	Telah di akomodir dalam pagu OPD

Rencana Kerja Tahun 2024

No	E-POKIR				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Pengusul dan Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	NASRUL		50 orang (Rp. 25.000.000,-)	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	480,899,825	Telah di akomodir dalam pagu OPD
4	Pelatihan Menjahit (Lanjutan)	WULAN DENURA, S.ST		Rp. 180.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, sebanyak 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
5	Pelatihan MUA	WULAN DENURA, S.ST		2 Angkatan (Rp. 195.000.000)	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Telah di akomodir dalam pagu OPD, sebanyak 1 paket (16 orang), dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-

Rencana Kerja Tahun 2024

No	E-POKIR				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
	Kegiatan Prioritas	Pengusul dan Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Hibah Mesin Jahit	WULAN DENURA, S.ST		Rp. 110.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,349,290,172	Tolak, karena harus ada pengajuan proposal hibah. Untuk bantuan hibah ke masyarakat Tahun 2024 dilengkapi dengan proposal selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2023 sudah diajukan, dengan mempedomani Perwako Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
7	Pelatihan Merajut	WULAN DENURA, S.ST		Rp. 100.000.000	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	452,344,205	Telah di akomodir dalam pagu OPD, sebanyak 1 paket

**Tabel II.4.b**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

**PD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>				
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>				
a	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Payakumbuh	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 orang	Untuk program magang ke Jepang, kita perlu melaksanakan pelatihan bahasa Jepang, Tahun 2024 direncanakan mengadakan pelatihan bahasa Jepang

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>B</b>	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>				
1	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>				
a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Payakumbuh	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	8 IKM	Untuk sertifikasi halal, Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ada kegiatan untuk fasilitasi sertifikasi halal

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang berpijak pada Kebijakan Nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan satu kesatuan dalam membantu tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan tahapan dalam perumusan perencanaan dan penganggaran dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian secara substansi tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Payakumbuh.

### **3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024**

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan.

Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.

#### **1. Visi**

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden–Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

#### **2. Misi**

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- b. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- d. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- e. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- f. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- g. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- h. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut yaitu :

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan;
  - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Tujuan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan :
- a. Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
  - b. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
  - c. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa yang akan datang;
  - d. Mewujudkan visi baru hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
  - e. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
  - f. Mewujudkan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
  - g. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.
4. Sasaran Strategis Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah sasaran strategis, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, di mana kontribusi ini merupakan kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, yang dihitung berdasarkan besar upah yang diterima penduduk bekerja pada tahun t.
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024**

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian periode Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, yang digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Di dalam renstra ini tertaung visi dan misi, Visi kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan Visi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan misi yang tempuh untuk mencapai visi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, Kementerian Perindustrian menetapkan arah kebijakan pembangunan sektor industri pada pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, fiskal dan non

fiskal serta kebijakan reformasi birokrasi, dengan berbagai strategi dan langkah operasional sebagai bentuk implementasi dari kebijakan yang telah direncanakan.

Strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh Kementerian Perindustrian adalah:

1. Pembangunan sumber daya manusia industri;
2. Pemanfaatan Sumber daya alam;
3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
5. Penyediaan sumber pembiayaan;
6. Pengembangan standardisasi industri;
7. Pengembangan infrastruktur industri;
8. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
9. Pengembangan industri kecil dan menengah;
10. Pengembangan industri hijau;
11. Pengembangan industri strategis;
12. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
13. Kerjasama internasional di bidang industri;
14. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
15. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri;
16. Program pembangunan kawasan industri;
17. Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM;
18. Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri *existing* dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas;
19. Upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri *existing* yang melakukan perluasan komoditi baru;
20. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi baru;

Kerhasilan pembangunan industri tidak hanya tergantung kepada Kementerian Perindustrian saja akan tetapi juga membutuhkan dukungan dari stakeholder lainnya, seperti pihak swasta, pemerintah daerah, akademisi maupun masyarakat luas.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam memenuhi tujuan dan sasarannya untuk kurun waktu satu tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rumusan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatnya produktifitas sector industri;
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah.

Tujuan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah menerapkan prinsip Good Governance dilingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peningkatan pelayanan yang mendasar harus diperbaiki, agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan menumbuhkan sikap akuntabel, maka harus ditunjang dengan system administrasi dan pemerintahan yang baik, sarana dan prasarana yang cukup, wawasan serta pengetahuan aparat yang luas serta regulasi peraturan yang mampu mempercepat pembangunan. Pada akhirnya keseluruhan tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada satu tahun ke depan dapat tercapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya produksi industri pengolahan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat, sesuai dengan kewenangan, tugas

pokok dan fungsinya telah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :  
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah periode 2023-2026.

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sangat memperhatikan program pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dilihat pada rencana kegiatan meningkatkan SDM angkatan kerja dan keterampilan angkatan kerja dengan melalui pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, memfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Potensi ekonomi Kota Payakumbuh yang sebagian besar masyarakatnya bergerak dibidang IKM sangat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dimana IKM ini perkembangannya stabil tidak dipengaruhi oleh dampak globalisasi.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 terdiri dari 8 Program, 16 Kegiatan dan 35 Sub kegiatan yang sebagian besar terfokus kepada menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran dan meningkatnya sektor strategis yang didukung oleh Kebijakan yang terukur dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dan IKM dengan total kebutuhan dananya sebesar Rp. 6.301.456.270,- (enam milyar tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Untuk Tahun 2024 Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengusulkan program sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang sumber dana berasal dari dana APBD dapat dilihat pada tabel III.1.

**Tabel III.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

**PD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN TENAGA KERJA				4,763,298,496				5,397,769,391
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	A	3,244,467,286			A	3,662,919,615
		Nilai IKM		91				92	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan		80%	70,765,600			80%	77,842,160

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	19,266,350	DAU Bebas		4 dokumen	21,192,985
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 laporan	51,499,250	DAU Bebas		12 laporan	56,649,175
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas</b>		<b>80%</b>	<b>2,639,536,252</b>			<b>80%</b>	<b>2,903,489,877</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21 orang/bulan	2,455,472,402	DAU		21 orang/bulan	2,701,019,642
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 dok	184,063,850	DAU Bebas		1 dok	202,470,235
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap</b>		<b>100%</b>	-			<b>100%</b>	<b>12,600,000</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		21 paket	-	DAU Bebas		21 paket	12,600,000

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor</b>		80%	146,306,550			80%	160,937,205
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 paket	1,988,750	DAU Bebas		6 paket	2,187,625
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		63 paket	19,826,850	DAU Bebas		45 paket	21,809,535
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		9 paket	15,928,550	DAU Bebas		9 paket	17,521,405
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2 dokumen	3,008,400	DAU Bebas		1 dokumen	3,309,240
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		8 laporan	10,534,000	DAU Bebas		1 laporan	11,587,400
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 laporan	95,020,000	DAU Bebas		15 laporan	104,522,000

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>	-			<b>100%</b>	<b>75,767,000</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	-	DAU Bebas		1 unit	30,800,000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		1 unit	-	DAU Bebas		1 unit	44,967,000
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>		<b>80%</b>	<b>283,178,884</b>			<b>80%</b>	<b>311,496,772</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 laporan	167,880,524	DAU Bebas		2 laporan	184,668,576
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	115,298,360	DAU Bebas		12 laporan	126,828,196

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan</b>		80%	104,680,000			80%	120,786,600
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	39,190,000	DAU Bebas		1 unit	43,109,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 unit	59,400,000	DAU Bebas		12 unit	65,340,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		48 unit	-	DAU Bebas		48 unit	5,638,600
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9 unit	6,090,000	DAU Bebas		9 unit	6,699,000
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun</b>		0,81%	102,150			3,2%	65,583,529

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun</b>		<b>0,81%</b>	<b>102,150</b>			<b>3,2%</b>	<b>65,583,529</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro		1 dok	-	DAU Bebas		1 dok	54,539,969
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		1 perusahaan	102,150	DAU Bebas		1 perusahaan	11,043,560
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>		<b>3,95%</b>	<b>1,375,189,118</b>			<b>3,97%</b>	<b>1,512,708,030</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</b>		<b>80%</b>	<b>1,349,290,172</b>			<b>80%</b>	<b>1,484,219,189</b>
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		248 orang	1,349,290,172	- DAU Diarahkan : Rp. 914.290.172,- (164 orang) - Insentif fiskal : Rp. 435.000.000,- (80 orang)		228 orang	1,484,219,189

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</b>		70%	25,898,946			80%	28,488,841
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		12 lembaga	25,898,946	DAU Diarahkan		12 lembaga	28,488,841
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</b>		46,45%	115,801,042			46,50%	126,045,427
	<b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan</b>		46,45%	28,662,450			46,50%	30,192,976
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		20 orang	28,662,450	Insentif Fiskal		20 orang	30,192,976
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja</b>		80%	87,138,592			80%	95,852,451

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		250 orang	87,138,592	DAU Bebas		250 orang	95,852,451.20
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan</b>		<b>4,03%</b>	<b>27,738,900</b>			<b>4,03%</b>	<b>30,512,790</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama</b>		<b>75%</b>	<b>27,738,900</b>			<b>75%</b>	<b>30,512,790</b>
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		7 Perkara	23,538,000	DAU Bebas		7 Perkara	25,891,800

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		3 Perkara	4,200,900	DAU Bebas		3 Perkara	4,620,990
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PERINDUSTRIAN</b>				<b>1,538,157,774</b>				<b>1,916,753,276</b>
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna</b>		<b>0,10%</b>	<b>1,476,158,424</b>			<b>0,10%</b>	<b>1,773,664,046</b>
		<b>Persentase Sentra/Klaster Yang Tertata</b>		<b>20.00%</b>				<b>20.00%</b>	
	<b>Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</b>		<b>66,67%</b>	<b>1,476,158,424</b>			<b>66,67%</b>	<b>1,773,664,046</b>

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1 dokumen	480,899,825	DAU Bebas : Rp. 250.899.825,- Insentif Fiskal : Rp. 230.000.000,-		1 dokumen	528,989,808
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 dokumen	35,160,200	DAU Bebas		1 dokumen	38,676,220
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	507,653,994	DAU Bebas		1 dokumen	558,419,393
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 dokumen	452,344,205	DAU Bebas : Rp. 146.006.655,- Insentif Fiskal : Rp. 306.337.550,-		1 dokumen	497,578,626
	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	100,200	DAU Bebas		1 dokumen	150,000,000

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk</b>		2,50%	61,899,300			2,60%	68,089,230
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>	<b>Jumlah pelaku industri yang difasilitasi</b>		6 IKM	61,899,300		-	6 IKM	68,089,230
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		1 dokumen	61,899,300	DAU Bebas		1 dokumen	68,089,230

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas		1 perusahaan	100,050		-	1 perusahaan	75,000,000
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri		33,33%	100,050			33,33%	75,000,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		1 dokumen	100,050	DAU Bebas		1 dokumen	75,000,000
<b>TOTAL</b>					<b>6,301,456,270</b>				<b>7,314,522,667</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian akan terus berlanjut dan di prioritaskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan rencana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Untuk Tahun 2024 Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengusulkan program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang sumber dana berasal dari dana APBD dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

PD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2025 (Rp.)
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN TENAGA KERJA								4,763,298,496	5,397,769,391
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	A					3,244,467,286	3,662,919,615
			Nilai IKM	91						
2 07 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	70,765,600	77,842,160
2 07 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen			19,266,350	21,192,985
2 07 01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan			51,499,250	56,649,175
2 07 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	2,639,536,252	2,903,489,877
2 07 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan			2,455,472,402	2,701,019,642
2 07 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok			184,063,850	202,470,235
2 07 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	-	12,600,000

Rencana Kerja Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2025 (Rp.)	
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
2.07.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket			-	12,600,000	
2.07.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>80%</b>	<b>146,306,550</b>	<b>160,937,205</b>
2.07.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket			1,988,750	2,187,625	
2.07.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 paket			19,826,850	21,809,535	
2.07.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	9 paket			15,928,550	17,521,405	
2.07.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen			3,008,400	3,309,240	
2.07.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan			10,534,000	11,587,400	
2.07.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan			95,020,000	104,522,000	
2.07.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>75,767,000</b>
2.07.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit			-	30,800,000	
2.07.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit			-	44,967,000	
2.07.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>80%</b>	<b>283,178,884</b>	<b>311,496,772</b>
2.07.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan			167,880,524	184,668,576	

Rencana Kerja Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2025 (Rp.)
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2 07 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan			115,298,360	126,828,196
2 07 01 2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	80%	104,680,000	120,786,600
2 07 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit			39,190,000	43,109,000
2 07 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit			59,400,000	65,340,000
2 07 01 2.09 05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel				Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 unit			-	5,638,600
2 07 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit			6,090,000	6,699,000
2 07 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,81%					102,150	65,583,529
2 07 02 2.01	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)</b>						Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,81%	102,150	65,583,529
2 07 02 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	1 dok			-	54,539,969
2 07 02 2.01 02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 perusahaan			102,150	11,043,560
2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,95%					1,375,189,118	1,512,708,030

Rencana Kerja Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2025 (Rp.)			
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)						
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12			
2	07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	1,349,290,172	1,484,219,189
2	07	03	2.01	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	248 orang			1,349,290,172	1,484,219,189
2	07	03	2.02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70%	25,898,946	28,488,841
2	07	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 lembaga			25,898,946	28,488,841
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,45%					115,801,042	126,045,427
2	07	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,45%	28,662,450	30,192,976
2	07	04	2.01	05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang			28,662,450	30,192,976
2	07	04	2.03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	87,138,592	95,852,451
2	07	04	2.03	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3 orang			87,138,592	95,852,451

Rencana Kerja Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2025 (Rp.)	
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
2	07	05								27,738,900	30,512,790
2	07	05	2.02							27,738,900	30,512,790
2	07	05	2.02	01						23,538,000	25,891,800
2	07	05	2.02	02						4,200,900	4,620,990
3	31									1,538,157,774	1,916,753,276
3	31	02								1,476,158,424	1,773,664,046
3	31	02	2.01							1,476,158,424	1,773,664,046

Rencana Kerja Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2025 (Rp.)			
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)						
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12			
3	31	02	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen		480,899,825	528,989,808	
3	31	02	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen		35,160,200	38,676,220	
3	31	02	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen		507,653,994	558,419,393	
3	31	02	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen		452,344,205	497,578,626	
3	31	02	2.01	06	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen		100,200	150,000,000	
3	31	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>						61,899,300	68,089,230	
3	31	03	2.01		<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>					Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	6 IKM	61,899,300	68,089,230
3	31	03	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen		61,899,300	68,089,230	

Rencana Kerja Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif Tahun 2024 (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2025 (Rp.)			
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)						
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12			
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	1 perusahaan				100,050	75,000,000
3	31	04	2.01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					Persentase Penyediaan Informasi Industri	33,33%	100,050	75,000,000
3	31	04	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasiona (SIINAS)			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasiona (SIINAS)	1 dokumen			100,050	75,000,000
TOTAL										6,301,456,270	7,314,522,667		

Disamping itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengajukan usulan pembangunan Tahun 2024 yang dibiayai dari dana APBN yang dapat dilihat pada tabel IV.2.

**Tabel IV.2**  
**USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL**  
**SUMBER DANA APBN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**PD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>									
1	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	320,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan Barbershop/MUA dan bantuan peralatan dengan peserta 32 orang
2	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	180,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan Magang ke Jepang peserta 32 orang

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	1,200,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan kompetensi : otomotif, las prosesing dan busana dengan peserta 64 orang (4 angkatan)
4	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	600,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha masyarakat dengan peserta 32 orang (2angkatan)
5	Kementerian Tenaga Kerja	Peningkatan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja	Meningkatnya pelayanan kepada pencari kerja dalam pembuatan AK 1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pencari kerja yang dilayani	275,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Operasional pelayanan AK1
6	Kemertrian Tenaga Kerja	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial tebnaga kerja	Program Hubungan Industrial	pendataan sinergitas hubungan industrial	perusahaan	150,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	operasional pendataan sarana hubungan industrial ke perusahaan (50 perusahaan)

Rencana Kerja Tahun 2024

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Terlaksananya pameran bursa kerja (Job Fair) oleh perusahaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Perusahaan	150,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pameran Bursa Kerja dengan peserta 25 perusahaan
8	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	250,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan peserta 100 perusahaan
<b>II</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>									
1	Kementerian Perindustrian	Direktorat Jendral Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Sentra IKM pangan yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sentra	500,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pengadaan peralatan laboratorium (1 paket) dan fasilitasi sertifikasi sentra IKM rendang (1 paket)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian, yang mengacu kepada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam program prioritas pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2024, yang memuat tentang arah kebijakan, program kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan pagu indikatif dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam mencapai hasil tersebut. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Rencana Strategis Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan memudahkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk proving (Membuktikan) kinerja dan untuk improving (Memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Rencana Kerja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas

tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap sub kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di Tahun 2024.

## 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024, yang memuat program kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2024, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, yang mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja mengacu pada :
  - a. Program Pembangunan Nasional;
  - b. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
  - c. Renstra Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
  - d. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023;
  - e. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya;
  - f. Berdasarkan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat.
2. Rencana Kerja memuat :
  - b. Sasaran dan indikator kinerja Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
  - c. Program dan kegiatan;
  - d. Indikator kinerja;
  - e. Rencana tingkat capaian (target);
  - f. Pagu indikatif dan prakiraan maju.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut


Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Penetapan prioritas pembangunan urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian secara terkoordinir, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan;
2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam program pembangunan urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian;
3. Pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
4. Adanya upaya peningkatan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian yang menjadi tugas dan fungsi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Agustus 2023  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Payakumbuh



  
**NUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670601 198809 2 001

# LAMPIRAN

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN</b>						<b>5.793.802.276,00</b>							<b>6.607.557.705,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						<b>4.763.298.496,00</b>							<b>5.249.223.821,00</b>	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						<b>4.763.298.496,00</b>							<b>5.249.223.821,00</b>	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian</i>	-			A kategori 91 indeks	<b>3.244.467.286,00</b>						-	<b>3.568.914.014,00</b>	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan</i>	-			80 persen	70.765.600,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Perekono mian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	77.842.160,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	19.266.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Perekono mian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		21.192.985,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	51.499.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Perekono mian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		56.649.175,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas</i>	-			80 persen	2.639.536.252,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	2.903.489.877,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				21 Orang/bulan	2.455.472.402,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		2.701.019.642,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	184.063.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		202.470.235,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor</i>	-			80 persen	146.306.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	160.937.205,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	1.988.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		2.187.625,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				63 Paket	19.826.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		21.809.535,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				9 Paket	15.928.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		17.521.405,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	3.008.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3.309.240,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				8 Laporan	10.534.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		11.587.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				15 Laporan	95.020.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		104.522.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</i>	-			80 persen	283.178.884,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	311.496.772,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	167.880.524,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		184.668.576,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	115.298.360,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		126.828.196,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan</i>	-			80 persen	104.680.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	115.148.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	39.190.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		43.109.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	59.400.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		65.340.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				9 Unit	6.090.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		6.699.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.07.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b><i>Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun</i></b>	-			0,81 %	102.150,00						-	11.043.560,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun</i>	-			0,81 persen	102.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	11.043.560,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>				1 Orang	102.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		11.043.560,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi</i>	-			3,95 %	1.375.189.118,00						-	1.512.708.030,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	-			80 persen	1.349.290.172,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	1.484.219.189,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				248 Orang	1.349.290.172,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1.484.219.189,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina</i>	-			70 persen	25.898.946,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	28.488.841,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>				12 Lembaga	25.898.946,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		28.488.841,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota</i>	-			46,45 %	115.801.042,00						-	126.045.427,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan</i>	-			46,45 persen	28.662.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	30.192.976,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				20 Orang	28.662.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		30.192.976,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja</i>	-			80 persen	87.138.592,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	95.852.451,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				250 Orang	87.138.592,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		95.852.451,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</i>	-			4,03 %	27.738.900,00						-	30.512.790,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama</i>	-			75 persen	27.738.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	30.512.790,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				7 Perkara	23.538.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		25.891.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				3 Perkara	4.200.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		4.620.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.030.503.780,00							1.358.333.884,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						968.604.480,00							1.290.244.654,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata</i>	-			0,10 % 20 %	968.504.430,00						-	1.215.244.654,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	-			66,67 persen	968.504.430,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	1.215.244.654,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>				1 Dokumen	480.899.825,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		528.989.808,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				1 Dokumen	35.160.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		38.676.220,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	452.344.205,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		497.578.626,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	100.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<i>Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS</i>	-			1 perusahaan	100.050,00						-	75.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyediaan Informasi Industri</i>	-			33,33 persen	100.050,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				1 Dokumen	100.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						61.899.300,00							68.089.230,00	
1.	3.31.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<i>Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk</i>	-			2,50 %	61.899.300,00						-	68.089.230,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi</i>	-			6 IKM	61.899.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	68.089.230,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</i>				1 Dokumen	61.899.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		68.089.230,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
		<b>UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)</b>						<b>507.653.994,00</b>								<b>558.419.393,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>507.653.994,00</b>							<b>558.419.393,00</b>		
	<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>507.653.994,00</b>							<b>558.419.393,00</b>		
1.	<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<i>Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata</i>	-			<b>0,10 % 20 %</b>	<b>507.653.994,00</b>						-	<b>558.419.393,00</b>		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	-			66,67 persen	507.653.994,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	558.419.393,00	UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	507.653.994,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		558.419.393,00	UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)	
		<b>J U M L A H</b>							<b>6.301.456.270,00</b>							<b>7.165.977.098,00</b>	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R) KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)</b>						<b>507.653.994,00</b>								<b>558.419.393,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>507.653.994,00</b>								<b>558.419.393,00</b>	
	<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>507.653.994,00</b>								<b>558.419.393,00</b>	
1.	<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<i>Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata</i>	-			<b>0,10 % 20 %</b>	<b>507.653.994,00</b>						-		<b>558.419.393,00</b>	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	-			66,67 persen	507.653.994,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	558.419.393,00	UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	507.653.994,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		558.419.393,00	UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)	
	<b>J U M L A H</b>								<b>507.653.994,00</b>							<b>558.419.393,00</b>	



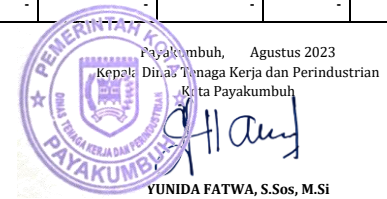
Kode Rekening					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2024 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)						Ket				
							DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
										Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR		Bid Kewilayahan			P3K
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	07	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,008,400	3,008,400										
2	07	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,534,000	10,534,000										
2	07	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,020,000	95,020,000										
2	07	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	07	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-										
2	07	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-										
2	07	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	283,178,884	283,178,884	-	-	-	-	-	-	-			
2	07	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167,880,524	167,880,524										
2	07	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115,298,360	115,298,360										
2	07	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	104,680,000	104,680,000	-	-	-	-	-	-	-			
2	07	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000	39,190,000										
2	07	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,400,000	59,400,000										
2	07	01	2.09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	-	-										
2	07	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,090,000	6,090,000										
2	07	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	102,150	102,150	-	-	-	-	-	-	-			



Kode Rekening					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2024 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)							Ket			
							DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
										Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	Bid Kewilayahan				P3K
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	07	05	2.02	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23,538,000	23,538,000										
2	07	05	2.02	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,200,900	4,200,900										
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>1,538,157,774</b>	<b>1,001,820,224</b>	-	-	-	-	-	536,337,550				
3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1,476,158,424</b>	<b>939,820,874</b>	-	-	-	-	-	536,337,550				
3	31	02	2.01		<b>Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>1,476,158,424</b>	<b>939,820,874</b>	-	-	-	-	-	536,337,550				
3	31	02	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	480,899,825	250,899,825						230,000,000				
3	31	02	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	35,160,200	35,160,200										
3	31	02	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	507,653,994	507,653,994										
3	31	02	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	452,344,205	146,006,655						306,337,550				
3	31	02	2.01	06	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100,200	100,200										
3	31	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>61,899,300</b>	<b>61,899,300</b>	-	-	-	-	-	-				

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja 2024 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)									Ket		
			DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD		Insentif Fiskal	
						Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	Bid Kewilayahan	P3K				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3 31 03 2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	61,899,300	61,899,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 31 03 2.01 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	61,899,300	61,899,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100,050	100,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 31 04 2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100,050	100,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 31 04 2.01 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	100,050	100,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>6,301,456,270</b>	<b>4,361,267,152</b>	-	-	<b>940,189,118</b>	-	-	-	-	-	<b>1,000,000,000</b>	-	-

Payakumbuh, Agustus 2023  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Payakumbuh



**YUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19670601 198809 2 001

**Tabel Definisi Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**  
**Kota Payakumbuh**

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.07</b>	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>					
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai IKM</b>	<b>Nilai</b>		
			<b>Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat</b>	<b>Nilai</b>		
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>%</b>		
2.07.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melakukan rangkaian aktivitas dalam memenuhi tahapan dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah), penyusunan RKA SKPD, perubahan RKA SKPD, penyusunan DPA SKPD, penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja bahan komputer - Belanja makan minum rapat
2.07.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun kinerja termasuk juga LAKIP, LPPD dan LKPJ dan kegiatan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan perangkat daerah termasuk pelaksanaan rapat-rapat internal perangkat daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja makan minum rapat - Belanja makan minum lembur - Belanja uang lembur

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas</b>	%		
2.07.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan ini merupakan penyediaan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN serta jaminan pemeliharaan kesehatan ASN dan calon ASN, serta insentif retribusi dan pajak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		- Belanja ATK - Belanja gaji dan tunjangan ASN - Belanja jaminan kesehatan ASN dan Calon ASN - Belanja insentif retribusi dan pajak
2.07.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN untuk pembayaran honor pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan honor UKPBJ, honor pengelola keuangan, PA, KPA, PPTK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen		- Belanja ATK - Belanja honor pengelolaan keuangan daerah
<b>2.07.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap</b>	%		
2.07.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian pakaian dinas beserta atribut kelengkapan bagi ASN yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pegawai dalam berpakaian dinas sesuai aturan yang berlaku.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket		- Belanja pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor</b>	%		
2.07.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Digunakan untuk pembelian komponen listrik/penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kuning)
2.07.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Digunakan untuk pembelian bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja bahan komputer - Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya - Belanja Materi

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
2.07.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Digunakan untuk Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotocopi umum, cetak spanduk, cetak buku dan lainnya)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		- Belanja spanduk - Belanja cetak - Fotocopi, jilid
2.07.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Digunakan untuk Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan (Koran, majalah, dll)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen		- Belanja surat kabar/majalah
2.07.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Serangkaian kegiatan pelayanan untuk tamu mulai dari penyambutan, prosesi/pertemuan sampai tamu meninggalkan tempat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Porsi		- Belanja makan minum tamu
2.07.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan kegiatan menghadiri rapat-rapat berdasarkan undangan dan inisiatif untuk mengkonsultasikan bidang pekerjaan SKPD ke pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		- Belanja perjalanan dinas biasa (Dalam daerah dan luar daerah)
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah</b>	%		
2.07.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasioanal khusus, lapangan dan pelayanan umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		- Belanja modal kendaraan dinas lapangan/operasional
2.07.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Digunakan untuk Pembelian barang milik daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengolongan dan kodefikasi Barang Milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya uang Disediakan	unit		- Belanja modal komputer, laptop dan printer
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	%		
2.07.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan pembayaran kewajiban setiap bulan untuk biaya telekomunikasi, PDAM dan PLN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		- Belanja jasa telepon dan listrik

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
		Kegiatan pembayaran kewajiban setiap bulan untuk biaya telekomunikasi, PDAM dan PLN	Jumlah Rekening Air, Listrik, Internet, Telp/Fax yang Dibayarkan	rekening		
2.07.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor yang diberikan seperti resepsionis, sopir, dan tenaga administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		- Belanja makan dan minum - Belanja jasa Tenaga Harian Lepas
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan</b>	%		
2.07.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Digunakan untuk menyediakan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Pejabat Eselon II
2.07.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Digunakan untuk menyediakan jasa pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat - Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda dua
2.07.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Digunakan untuk menyediakan pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit		- Belanja bahan baku bangunan - Belanja jasa upah buruh/tukang
2.07.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	digunakan untuk menyediakan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		- Service AC dan Komputer
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun</b>	%		
<b>2.07.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)</b>		<b>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun</b>	%		

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
2.07.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dipakai untuk pelaksanaan kegiatan pembuatan naskah akademis dan Rencana Peraturan daerah tentang ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	dokumen		- Belanja ATK - Belanja accesories komputer - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makan minum - Belanja jasa honor tim - Belanja jasa honor konsultan ( tenaga ahli penyusun Naskah Akademik) - Belanja perjalanan dinas
2.07.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dipakai untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan perusahaan dalam menyusun rencana tenaga kerja mikro pada tingkat perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	perusahaan		- Belanja ATK - Belanja accesories komputer - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makan minum - Belanja jasa honor tim
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	%		
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi</b>	%		
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi,mulai dari pembentukan tim, penyebarluasan informasi,pelaksanaan pelatihan, sampai pada evaluasi paska pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja bahan komputer - Belanja makan minum - Belanja cetak/penggandaan - Belanja jasa iklan - Belanja bahan mterial - Honor instruktur - Uang transpor - Bahan contoh utk praktek - Sewa peralatan - Sewa ruangan/tempat - Belanja dokumentasi - Belanja perjalanan dinas - Belanja pakaian kerja lapangan

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina</b>	%		
2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan lembaga pelatihankerja swasta, baik itu dari segi perizinan, rekrut peserta, materi pelatihan dll	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga		- Belanja ATK - Belanja makan minum rapat - Uang transport tim pembina
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja</b>	%		
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan</b>	%		
2.07.04.2.01.05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan dan upah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	orang		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya - Belanja makan minum rapat - Honorarium Narasumber - Belanja sewa bangunan - Belanja perjalanan dinas dalam Negeri
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja</b>	%		
2.07.04.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan bursa kesempatan kerja dengan tujuan utamanya penempatan yang dilakukan melalui pendaftaran pencari kerja, penunjukan lowongan yang tersedia serta pengantar untuk penempatan.	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja benda pos - Belanja bahan komputer - Belanja makan minum rapat - Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Belanja Iuran Jaminan /Asuransi


Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan</b>	%		
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama</b>	%		
2.07.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Digunakan untuk kegiatan pencegahan perselisihan dengan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan ke perusahaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara		- Belanja ATK - Belanja accesories komputer - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makan minum - Belanja jasa honor tim - Belanja perjalanan dinas dalam kota
2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Digunakan untuk kegiatan rapat-rapat perundingan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan/didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara		- Belanja ATK - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makan minum
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>					
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna</b>	%		
			<b>Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata</b>	%		

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</b>	%		
3.31.02.2.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan agenda-agenda Dekranasda (keikutsertaan dalam even-even yang diadakan oleh Dekranas Pusat seperti, Munas, mengikuti ajang promosi, studi tiru, dll)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen		- Belanja bahan-bahan lainnya (bahan contoh) - Belanja ATK - Belanja makan minum rapat - Belanja makan minum tamu - Kontribusi iven - Belanja sewa tempat - Perjalanan Dinas (dalam dan luar daerah) - Biaya paket pelatihan (tempat, narasumber, peserta)
3.31.02.2.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Melaksanakan workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM berupa pembuatan/modifikasi peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen		- Belanja bahan-bahan lainnya (bahan contoh) - Belanja ATK - Belanja makan minum rapat - Belanja sewa tempat - Biaya paket pelatihan (tempat, narasumber, peserta)
3.31.02.2.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Melakukan rangkaian aktivitas operasional dan pemeliharaan Sentra IKM Rendang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen		- Belanja isi tabung pemadam kebakaran - Belanja isi tabung gas - Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja bahan cetak - Belanja benda pos - Belanja bahan komputer - Belanja perabot kantor - Belanja alat listrik - Belanja natura - Belanja makan minuman rapat - Belanja makan minuman tamu - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin - Belanja pemeliharaan gedung - Belanja perjalanan dinas - Belanja modal alat kantor

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
3.31.02.2.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rangkaian kegiatan dalam rangka pembayaran honorarium dan iuran jaminan/asuransi Tenaga Disain dan Tenaga Penjaga Galeri Kriya dan Pengembangan Batik Cap bagi pelaku IKM batik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen		- Belanja bahan-bahan lainnya (bahan contoh) - Belanja ATK - Belanja makan minum rapat - Belanja sewa tempat - Biaya paket pelatihan (tempat, narasumber, peserta) - Pembayaran honor dan iuran BPJS TJP
3.31.02.2.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rangkaian kegiatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan IKM melalui Klinik Usaha seperti konsultan, pendampingan oleh tenaga terlatih atau praktisi bisnis serta fasilitasi pembentukan unit usaha penyediaan bahan baku	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen		- Belanja ATK - Belanja makan minum rapat - Belanja cetak - Belanja modal komputer (laptop dan printer) - Pembayaran honor tenaga tim
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk</b>	%		
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi</b>	<b>IKM</b>		
3.31.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI), IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Rangkaian kegiatan dalam rangka fasilitasi sertifikasi standar mutu produk IKM seperti sertifikat halal, ISO, HKI (Merek), MD, Suveylance HACCP Sentra Randang, Sertifikasi HACCP IKM, SNI (baru, perpanjangan), Pelatihan Ekspor serta uji labor produk makanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	dokumen		- Belanja ATK - Belanja makan minum rapat - Paket pelatihan - Belanja sertifikasi (belanja jasa konsultansi) - Belanja jasa tenaga laboratorium (uji labor produk makanan) - Perjalanan dinas
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Jumlah Data Perusahaan IKM Yang Masuk SIINas</b>	<b>dokumen</b>		
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penyediaan Informasi Industri</b>	%		

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumusan Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Catatan	Rencana Isi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
3.31.04.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rangkaian kegiatan dalam rangka pendataan dan updating potensi IKM Kota Payakumbuh	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen		- Belanja ATK - Belanja makan minum rapat - Belanja jasa pendata (tenaga pendata)

Payakumbuh, 11 Januari 2023  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Payakumbuh



**TUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19670601 198809 2 001



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara  
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : [disnakerprin@gmail.com](mailto:disnakerprin@gmail.com) Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**GENDER BUDGET STATEMENT**

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh  
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Kode kegiatan	2.07.03.2.01.01 (Sesuai RKA-SKPD)
Analisis Situasi	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b></p> <p>a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja (Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja dalam pembangunan Nasional merupakan factor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah atau wilayah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian Nasional.</p> <p>b. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah</p>

	<p>tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya.</p> <p>c. Angka proyeksi Tahun 2022 untuk Kota Payakumbuh, jumlah Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 73.939 orang dan jumlah Pengangguran sebanyak 4.805 3.812. Hal ini berarti ada penurunan Pengangguran dan ada kenaikan jumlah Angkatan Kerja yang bekerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengalami penurunan yang sebelumnya Tahun 2021 sebesar 6,47% dan di Tahun 2022 sebesar 5,16%*. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh perekonomian yang mulai stabil terutama di bidang industry maupun UMKM.</p> <p>d. Meskipun tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 6,47% menjadi 5,16%*, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan tetap menjadi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Tingkat pengangguran untuk Tahun 2022 di Kota Payakumbuh berjumlah 3.812 orang. Tingkat pengangguran banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 2.221 orang sedangkan perempuan sebanyak 1.591 orang.</p> <p>e. Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melakukan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja.</p> <p>f. Dengan pelatihan ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.</p> <p>g. Untuk Tahun 2023 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dilaksanakan dengan jumlah peserta 248 orang.</p>
--	--

	<p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut.</li> <li>➤ Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut.</li> <li>➤ Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan.</li> <li>➤ Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit.</li> </ul> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih minimnya pemahaman konsep Gender oleh peminat (Pencari kerja).</li> <li>➤ Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan pelatihan.</li> <li>➤ Adanya kesenjangan tingginya tingkat pengangguran laki-laki.</li> <li>➤ Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit dan membuat aneka kue/roti.</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan.</li> <li>➤ Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll.</li> <li>➤ Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.</li> </ul>	
Rencana Tindak	Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan

		Klaster Kompetensi
	Tujuan	Meningkatnya Keterampilan Para Pencari Kerja
	Aktivitas 1	<p>Pelaksanaan pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyeleksi dan menetapkan peserta pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang dari peserta yang mendaftar</li> <li>2. Menyelenggarakan pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang</li> <li>3. Membuat laporan kegiatan</li> </ol> <p><b>Input :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masyarakat dan pencari kerja</li> <li>2) Peserta pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang</li> <li>3) Narasumber dari Kota Payakumbuh</li> <li>4) Sarana prasarana : Peralatan untuk pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang</li> </ol>

			<p>dan bahan percontohan.</p> <p><b>Output :</b></p> <p>Terlaksananya pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang bagi masyarakat/pencari kerja Kota Payakumbuh.</p>
Sumber Dana	Rp. 1.349.290.172,-		
Outcomes	<p>Pelaksanaan pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang</p> <p><b>Rumusan Kinerja :</b></p> <p>1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan serta keterampilan bagi pencari kerja.</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <p>1) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 248 orang.</p> <p>2) Tersedianya keterampilan pencari kerja yang siap bersaing di pasar kerja.</p>		

Payakumbuh, Agustus 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Payakumbuh



*[Handwritten signature]*

**YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara  
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : [disnakerprin@gmail.com](mailto:disnakerprin@gmail.com) Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**GENDER BUDGET STATEMENT**

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh  
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Kode kegiatan	3.31.02.2.01.05 (Sesuai RKA-SKPD)
Analisis Situasi	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b></p> <p>a. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya.</p> <p>b. Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota berkembang di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki berbagai potensi terutama di segi industry dan wisata kuliner. Khusus disektor industry, Kota Payakumbuh memiliki berbagai industry makanan ringan, makanan spesifik/rending, industry coklat, perbengkelan alat mesin pertanian, kerajinan yang sudah menembus pasar Nasional.</p>

- c. Perkembangan industry Tahun 2022 mengalami kenaikan dari 1.928 IKM menjadi 2.000 IKM. Untuk perkembangan penyerapan tenaga kerja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 6.485 orang, yang terdiri laki-laki berjumlah 2.647 orang dan perempuan berjumlah 2.870 orang.
- d. Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui bidang perindustrian melakukan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam bentuk workshop. Tujuan workshop untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung dan mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya.
- e. Dengan diadakan workshop ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.

## **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**

### **a. Faktor Kesenjangan**

- Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki IKM dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri.
- Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri.
- Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan.
- Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri.

### **b. Penyebab Internal**

- Masih minimnya pemahaman konsep Gender oleh IKM.
- Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM.
- Lebih terbukanya kapasitas dan kesempatan perempuan

	<p>untuk berpartisipasi dalam kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan kepada IKM.</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan.</li> <li>➤ Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll.</li> <li>➤ Adanya wacana di masyarakat kalau pengrajin laki-laki tidak lazim.</li> </ul>		
Rencana Tindak	Kegiatan	<p>Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</p>	
		Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung.</li> <li>2) Mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP.</li> </ol>
		Aktivitas 1	<p>Pelaksanaan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menentukan dan mengundang peserta workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM</li> <li>2 Menyelenggarakan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM</li> <li>3 Membuat laporan kegiatan</li> </ol>

			<p><b>Input :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) IKM Kota Payakumbuh.</li> <li>2) IKM peserta workshop/IKM yang mengikuti pelatihan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir.</li> <li>3) Narasumber dari Propinsi dan Kota Payakumbuh.</li> <li>4) Sarana prasarana : Peralatan untuk workshop dan bahan percontohan.</li> </ol> <p><b>Output :</b></p> <p>Terlaksananya kegiatan workshop/pelatihan kepada IKM Kota Payakumbuh.</p>
Sumber Dana	Rp. 452.344.205,-		
Outcomes	<p>Pelaksanaan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM</p> <p><b>Rumusan Kinerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya dan berkembangnya kemampuan IKM dalam diversifikasi produk sesuai selera pasar dan mempromosikan produk hasil diversifikasi produk yang dihasilkan IKM.</li> </ol> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah peserta mengikuti workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri sebanyak 60 orang.</li> <li>2) Tersedianya keterampilan IKM yang menerapkan teknologi tepat guna, sehingga produk yang dihasilkan IKM sesuai selera pasar.</li> </ol>		

Payakumbuh, Agustus 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Payakumbuh



**UNIDA FATWA, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001

**GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)**

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1) Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya.	Untuk Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Workshop/pelatihan bagi 15 IKM sandang dan kerajinan yang dilaksanakan dengan 1 workshop/pelatihan yaitu : Workshop/pelatihan membuat	a) Masih minimnya pemahaman konsep Gender oleh IKM. b) Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. c) Lebih terbukanya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. d) Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan kepada IKM.	a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan. b) Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll. c) Adanya wacana di masyarakat kalau pengrajin laki-laki tidak lazim.	1) Untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung. 2) Mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP.	Pelaksanaan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM 1) Menentukan dan mengundang peserta workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM 2) Menyelenggarakan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM 3) Membuat laporan kegiatan	<b>Input :</b> 1) IKM Kota Payakumbuh. 2) IKM peserta workshop/IKM yang mengikuti pembinaan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir. 3) Narasumber dari Propinsi dan Kota Payakumbuh. 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk workshop dan bahan percontohan. <b>Output :</b> Terlaksananya kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM Kota Payakumbuh.	<b>Rumusan Kinerja :</b> 1) Meningkatnya dan berkembangnya kemampuan IKM dalam diversifikasi produk sesuai selera pasar dan mempromosikan produk hasil diversifikasi produk yang dihasilkan IKM. <b>Indikator Kinerja :</b> 1) Jumlah peserta mengikuti workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri sebanyak 60 orang 2) Tersedianya keterampilan IKM yang menerapkan teknologi tepat guna, sehingga produk yang dihasilkan IKM sesuai selera pasar
Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2) Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota berkembang di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki berbagai potensi terutama di segi industry dan wisata kuliner. Khusus disektor industry, Kota Payakumbuh memiliki berbagai industry makanan ringan, makanan spesifik/rending, industry coklat, perbengkelan alat mesin pertanian, kerajinan yang sudah menembus pasar Nasional.	Dengan keterlibatan mayoritas perempuan pada kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb:						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Tujuan * Untuk Menyajikan Produksi oleh IKM pada pengunjung * Mempromosikan Produksi dan Produk Jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya	3) Perkembangan industry Tahun 2021 mengalami kenaikan dari 1.928 IKM menjadi 2.000 IKM. Untuk perkembangan penyerapan tenaga kerja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 6.485 orang, yang terdiri laki-laki berjumlah 2.647 orang dan perempuan berjumlah 2.870 orang.  4) Untuk sector kerajinan khususnya lebih mayoritas perempuan, namun pengrajin laki-laki hanya ada beberapa orang.  5) Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui bidang perindustrian melakukan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam bentuk workshop. Tujuan workshop untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung dan mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya.  6) Dengan diadakan workshop ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.	<b>a. Dari aspek akses :</b> Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki IKM dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. <b>b. Dari aspek partisipasi :</b> Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. <b>c. Dari aspek control :</b> Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. <b>d. Dari aspek manfaat :</b> Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri.						



Payakumbuh, Agustus 2023  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
 Kota Payakumbuh

*[Handwritten Signature]*


**YUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670601 198809 2 001

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**  
**Tahun 2024**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%
2. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,25%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A

Payakumbuh, Agustus 2023  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Payakumbuh



  
**YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670601 198809 2 001



